BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Women's World Banking

Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia

2025

Laporan ini disusun dalam rangka penyusunan Kajian Model Bisnis Pengembangan Ekonomi Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten dengan Lensa Gender

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Women's World Banking

Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia

2025

Laporan ini Disusun Dalam Rangka Penyusunan Kajian Model Bisnis Pengembangan Ekonomi Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten dengan Lensa Gender

Ucapan terima kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyusunan kajian, menyediakan waktu, dan wawasan dalam proses penelitian.

- Pengurus dan anggota kelompok subsisten di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.
- Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.
- Kementerian/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM.
- Pemerintah Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Belitung, Dinas Perikanan Belitung, Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM (PLUT) Belitung, Pemerintah Desa Tanjung Binga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palu, BPN Palu, Dinas Ketenagakerjaan dan Industri Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana.
- Pelaku Usaha Sektor Keuangan: PNM, Amartha, Bank Sumsel Babel, BRI, BSI, Bank BPD Bali.
- Lembaga masyarakat: Rahima, PATTIRO, Salimah Bangka Belitung, Muslimat NU Sulawesi Tengah, AKAR, Komunitas Hidroponik Palu, Yayasan Arkom Palu, Toru Farm, Aisyiyah Bali.

Didukung pengumpul data oleh Rico Setiawan dan Kharisma Utari, dan peninjau oleh Yulius Hendra.

Tim penulis

Bank Indonesia
Irene Heniwati
Reny Titalay
Siti Humaira
Alfira Chaerunnisa
Andy P. Sujana
Siti Karimah

Women's World Banking
Agnes Salyanty
Desi Vicianna
Vitasari Anggraeni
Silva Berlus Coni

Laporan ini terwujud atas dukungan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) sebagai bagian dari dukungannya terhadap inisiatif alumni *Leadership Development Program for Regulators* (LDR) dan terhadap Women's World Banking untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia melalui inklusi keuangan.

Kata pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan, Bank Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung ketahanan ekonomi kelompok rentan, memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, serta mendorong digitalisasi pembayaran di tingkat akar rumput.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk memastikan bahwa pengembangan EKI tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, terutama perempuan pelaku usaha mikro. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika partisipasi perempuan dalam kelompok subsisten, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha mereka.

Penguatan program EKI melalui pendekatan yang berperspektif gender pada seluruh tahapan tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi lokal. Perempuan, yang mewakili lebih dari separuh populasi produktif Indonesia, harus menjadi bagian integral dalam ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program yang lebih responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior, Bank Indonesia

Daftar isi

Ucapan terima kasih 03

Kata pengantar 04

Daftar tabel dan gambar 06

Ringkasan eksekutif 07

Pendahuluan 08

Tinjauan literatur 09

Metodologi penelitian 15

- **Pendekatan *Women-Centered Design* (WCD)** 15
- **Desain pendekatan campuran (*mixed-methods*)** 16

Temuan kunci 18

- **Temuan 1:** Norma gender membentuk persepsi dan pola partisipasi dalam kelompok usaha yang membuat keterlibatan perempuan sering dianggap kurang aktif atau kurang berkontribusi dibandingkan laki-laki 18
- **Temuan 2:** Karakteristik anggota dan model usaha menentukan arah keberlanjutan kelompok usaha dan kebermanfaatan bagi anggotanya 24
- **Temuan 3:** Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan penggunaan layanan keuangan formal di tingkat kelompok, lemahnya ekosistem digital dan terbatasnya kapabilitas menyebabkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh anggota, khususnya perempuan, belum optimal 33
- **Temuan 4:** Peran ganda perempuan dalam rumah tangga memengaruhi rendahnya partisipasi, keterlibatan, dan dampak yang dirasakan anggota perempuan dari pelatihan 38

Rekomendasi 41

- **Tahap persiapan** 41
- **Tahap implementasi** 48
- **Tahap *monitoring* dan evaluasi** 53

Lampiran 59

- **Lampiran 1. Desain pendekatan campuran** 59
- **Lampiran 2. Metode analisis untuk penyusunan rekomendasi** 61

Daftar pustaka 62

Daftar tabel

Tabel 1. Perbandingan sektor kelompok usaha perempuan dan laki laki 19

Tabel 2. Pengaruh struktur kepemimpinan terhadap dinamika kelompok 23

Tabel 3. Analisa APKM (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) dalam persona 32

Tabel 4. Hambatan dan aspirasi anggota terkait pelatihan 39

Tabel 5. Perbedaan kebutuhan pelatihan antara perempuan dan laki-laki 40

Tabel 6. Rekomendasi perubahan instrumen survei awal 45

Tabel 7. Contoh desain program berdasarkan persona 46

Tabel 8. Ringkasan penguatan pengukuran dimensi pengelolaan keuangan 56

Tabel 9. Rekomendasi instrumen penguatan kelembagaan 58

Daftar gambar

Gambar 1. Lokasi penelitian 25

Gambar 2. Tipe pembentukan kelompok berdasarkan asal-usul pembentukannya 26

Gambar 3. Model usaha kelompok berdasarkan cara menjalankan usaha 27

Gambar 4. Variasi pola pembentukan dan model usaha kelompok beserta karakteristiknya 28

Gambar 5. Variasi pola pembentukan dan model usaha kelompok beserta tantangan dan dampaknya 29

Gambar 6. Persona utama 30

Gambar 7. Karakteristik persona 31

Gambar 8. Ilustrasi cerita bendahara kelompok 35

Ringkasan eksekutif

Studi ini dilakukan untuk memahami dan memperkuat efektivitas Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang diinisiasi Bank Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan pelaku usaha mikro di komunitas rentan. Melalui pendekatan *Women-Centered Design* (WCD) dan metode campuran (*mixed-method*) di empat wilayah — Jakarta, Belitung, Bali, dan Palu — kajian ini menggali hubungan antara norma gender, struktur kelompok, kepemimpinan, dan adopsi layanan keuangan formal terhadap kualitas partisipasi dan manfaat ekonomi yang diterima perempuan.

Temuan kunci mengungkap bahwa meski mayoritas anggota kelompok adalah perempuan, partisipasi mereka sering bersifat simbolik akibat dominasi figur sentral, akses pelatihan yang tidak merata, keterbatasan literasi keuangan dan digital, serta pencatatan keuangan yang belum terstandarisasi. Sebaliknya, kelompok dengan kepemimpinan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, pencatatan yang transparan, dan keterhubungan dengan ekosistem keuangan, menunjukkan tingkat keberlanjutan usaha dan inklusi keuangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan penguatan program EKI berbasis kelompok subsisten melalui pendekatan yang berperspektif gender pada tiga tahapan utama: persiapan, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi, agar program lebih efektif dan berdampak. Pada tahap **persiapan**, penting untuk memastikan prinsip kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) sebagai landasan narasi program, integrasi analisis gender dalam asesmen kelompok, serta pemetaan kondisi rumah tangga, beban kerja, dan hambatan sosial yang memengaruhi partisipasi. Pelibatan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sejak awal juga perlu diarahkan untuk memahami kebutuhan dan preferensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tahap **implementasi** menekankan pentingnya penguatan kelompok dan kelembagaan dengan mendorong representasi dan kepemimpinan perempuan, desain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta metode pembelajaran sejawat (*peer learning*) yang membangun solidaritas dan kepercayaan diri. Pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan secara adaptif dan inklusif, dengan memperhatikan kesenjangan literasi antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahap ***monitoring* dan evaluasi**, program diharapkan dapat secara eksplisit mengukur perubahan dan dampak dari perspektif gender, dengan indikator yang menangkap peningkatan agensi, kontrol atas sumber daya, dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan program pengembangan EKI berbasis kelompok subsisten sebagai instrumen makroprudensial yang tidak hanya memperluas inklusi keuangan dan digitalisasi pembayaran, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Pendekatan yang responsif gender akan memastikan perempuan, yang mewakili lebih dari separuh populasi produktif, menjadi penggerak setara dalam ekosistem ekonomi lokal, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pendahuluan

Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan berbasis kelompok. Di berbagai daerah, program ini telah menjadi kanal strategis untuk meningkatkan literasi keuangan, kapasitas usaha, serta akses terhadap layanan keuangan formal. Namun, agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan, pendekatan program perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan peran gender dalam struktur sosial dan ekonomi lokal.

Riset ini dilatarbelakangi oleh temuan di berbagai studi bahwa perempuan — khususnya pelaku usaha mikro dalam kelompok subsisten — masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pelatihan, pembiayaan, kepemilikan aset, serta pengambilan keputusan dalam ranah keuangan dan usaha. Hambatan-hambatan ini perlu dipahami lebih dalam melalui lensa konstruksi sosial dan relasi gender yang memengaruhi distribusi sumber daya yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga berakibat pada keterbatasan peran perempuan dalam kelompok dan komunitas. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ketika perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan, modal, dan jaringan usaha, terjadi peningkatan signifikan pada kapasitas ekonomi mereka serta efek ganda (*spillover effect*) terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas.[1]

Melalui kajian ini, Bank Indonesia dan Women's World Banking (WWB) bermaksud menelaah secara lebih mendalam sejauh mana program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten telah mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk menguatkan pendekatan responsif gender dalam replikasi program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok subsisten di berbagai Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN). Fokus khusus diberikan pada kelompok subsisten, karena karakteristik mereka yang rentan namun memiliki potensi transformatif apabila didukung dengan desain intervensi yang lebih inklusif.

Dengan memperkuat kerangka kerja berbasis bukti, laporan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi strategis dalam perumusan kebijakan dan desain program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, setara, dan berkelanjutan.

---

1 Amri, K. (2023). Pendapatan perempuan dan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pencerahan, 17*(2), 49–76. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4255635

Germann, F., Anderson, S. J., Chintagunta, P. K., & Vilcassim, N. (2023). *Breaking the glass ceiling: Empowering female entrepreneurs through female mentors* (BFI Working Paper). Becker Friedman Institute for Economics, University of Chicago. https://bfi.uchicago.edu/working-paper/breaking-the-glass-ceiling-empowering-female-entrepreneurs-through-female-mentors/

J-PAL. (2025, January). *Gender and Economic Agency Initiative: Women's economic empowerment and family planning*. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/review-paper/GEA_Research-framing-paper-on-WEE-and-FP_2025.01.06.pdf

Women's World Banking. (2025). *Empowering Indonesian women domestic workers through digital financial capability.* https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2025/03/WWB_Empowering-Indonesian-Women-Domestic-Workers-through-Digital-Financial-Capability.pdf

World Bank. (2020). *Adapting skills training to address constraints to women's participation* (Jobs Note No. 7). World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/100001588563785232/pdf/Adapting-Skills-Training-to-Address-Constraints-to-Women-s-Participation.pdf

World Bank. (n.d.). *Training, skills, and information*. Digital for Women. https://digitalforwomen.worldbank.org/training-skills-information

Tinjauan literatur

Tinjauan literatur ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan empiris bagi penguatan pendekatan gender-responsif dalam program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten. Dengan mengkaji bukti global, regional, dan nasional, bagian ini memperlihatkan bagaimana pendekatan program dan kebijakan yang responsif gender telah digunakan secara luas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam konteks pelaksanaannya di Indonesia.

Bukti-bukti ini menunjukkan upaya pendekatan responsif gender yang diintegrasikan secara strategis dalam desain program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok subsisten tidak hanya sekadar menjadi instrumen efektif untuk menjangkau perempuan subsisten, melainkan sebuah prasyarat untuk memperluas inklusi keuangan dan mempercepat pemerataan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Literatur ini tidak hanya menyoroti efektivitas pendekatan kelompok, tetapi juga menegaskan perlunya desain program yang responsif terhadap kondisi sosial dan gender yang timpang untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi anggota kelompok tetapi benar-benar memperoleh dan mengontrol manfaat ekonomi secara setara dan berdaya.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan kelompok: Bukti historis

Sejak lama, pendekatan berbasis kelompok telah digunakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di komunitas berpendapatan rendah dan di daerah dengan akses terbatas pada layanan keuangan formal. Studi global menunjukkan bahwa model seperti kelompok simpan pinjam, koperasi perempuan, dan kelompok usaha bersama telah menjadi pintu masuk penting bagi perempuan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan, pelatihan dan jaringan usaha, serta membangun ruang aman bagi perempuan untuk belajar dan berkolaborasi. Dalam konteks ini, kelompok tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga wadah sosial yang memungkinkan partisipasi aktif dan membangun rasa percaya diri kolektif dan solidaritas yang memperkuat ketahanan ekonomi mereka.

Di India, *Self-Help Groups* (SHGs) berhasil meningkatkan tabungan, akses kredit, serta kontrol perempuan atas pengeluaran rumah tangga. Hal serupa terlihat di Bangladesh melalui Grameen Bank, di mana kelompok kredit mikro turut meningkatkan keputusan finansial perempuan. Model ini juga direplikasi di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, yang menunjukkan efektivitas struktur kelompok dalam memperkuat kapasitas ekonomi perempuan secara berkelanjutan.[2]

Dalam konteks Indonesia, efektifitas pendekatan kelompok juga menunjukkan kecenderungan serupa. Studi di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, bahkan di tengah krisis pandemi. Perempuan anggota kelompok tetap menjalankan usaha rumahan secara mandiri saat kegiatan kelompok terhenti, mengindikasikan kapasitas adaptif yang lahir dari pengalaman kolektif.[3]

Demikian pula, evaluasi Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di delapan provinsi menunjukkan bahwa perempuan prasejahtera yang tergabung dalam kelompok pembiayaan mikro menunjukkan peningkatan aset dan ketahanan ekonomi, juga mengalami transformasi perilaku keuangan berupa kebiasaan menabung dan berinvestasi untuk usaha. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam struktur kelompok mampu memperkuat kapasitas ekonomi perempuan secara konsisten dari waktu ke waktu.[4]

---

2 Asian Development Bank. (2021). *Gender equality and social inclusion assessment*. Manila: ADB. https://www.adb.org/
International Fund for Agricultural Development. (2017). *Gender equality and women's empowerment: Policy*. Rome: IFAD. https://www.ifad.org/en/
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). *Rural women's empowerment in Southeast Asia*. Rome: FAO. http://www.fao.org
International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). Geneva: ILO. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/Women_men_informal_economy_statistical_picture.pdf
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2022). *Gender-responsive entrepreneurship development in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNESCAP. https://www.unescap.org
UN Women. (2020). *Gender equality and women's empowerment in Asia-Pacific*. Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific. https://asiapacific.unwomen.org

3 Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (2022). Proses pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Jurnal Pembangunan Manusia, 3(1), 1–25. https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/25/

4 Universitas Gadjah Mada. (2022). Studi Dampak Sosial Permodalan Usaha Mikro PNM bagi Peningkatan Kapasitas Perempuan, Laporan Akhir untuk PT Permodalan Nasional Madani, Yogyakarta: FISIPOL UGM

Kerangka analisis dan dampak program yang responsif gender

Pemberdayaan ekonomi secara transformatif tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang relasi dan struktur gender yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Kerangka APKM ini menyediakan lensa analisis yang kritis untuk menilai sejauh mana suatu program mampu mentransformasi atau justru mengukuhkan ketimpangan gender yang ada.

Keempat dimensi dalam kerangka APKM memiliki makna strategis dalam analisis program:

A Akses

Mengacu pada sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk memperoleh informasi, sumber daya, dan layanan yang tersedia dalam program pembangunan. Dalam konteks program kelompok subsisten, hal ini termasuk akses terhadap pelatihan, modal usaha, serta layanan keuangan formal yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.

P Partisipasi

Menilai kualitas keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Partisipasi bukan hanya didasarkan pada kehadiran simbolik (tokenisme), tetapi pada partisipasi bermakna yang mencerminkan suara dan aspirasi mereka yang mampu memengaruhi hasil program.

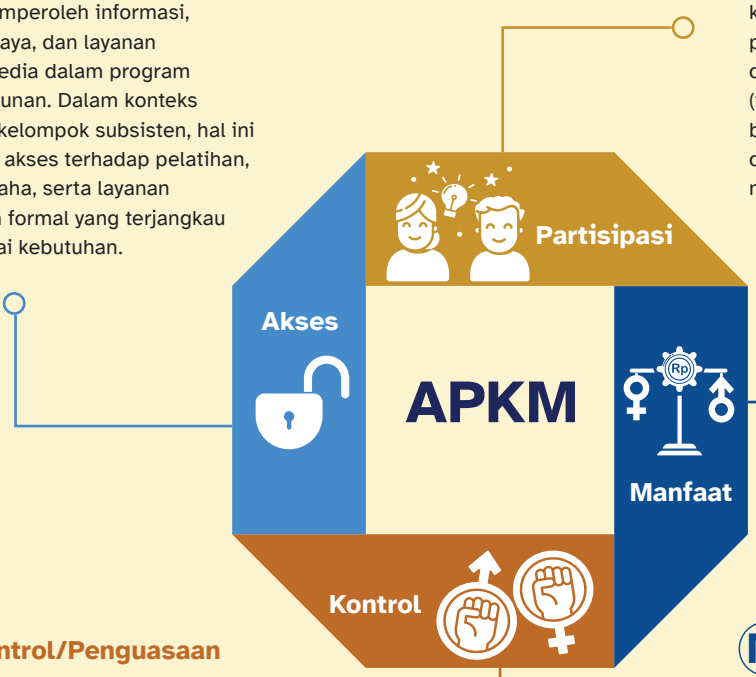

K Kontrol/Penguasaan

Menganalisis derajat kewenangan yang dimiliki perempuan dan laki-laki untuk memengaruhi arah dan hasil program, termasuk dalam mengelola sumber daya ekonomi, memimpin kelompok, dan menentukan keputusan strategis dalam usaha atau kelembagaan. Dimensi kontrol ini merupakan indikator utama pemberdayaan sejati, yang membedakannya dari sekadar partisipasi.

M Manfaat

Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki benar-benar memperoleh dan menikmati manfaat dari program secara adil dan setara, baik manfaat ekonomi langsung maupun manfaat sosial, seperti peningkatan posisi tawar dalam keluarga dan komunitas, serta pengakuan atas kontribusi mereka.

Dengan memahami kerangka ini, intervensi ekonomi harus dirancang untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelaku teknis di lapangan, tetapi juga utamanya memiliki otoritas dan kontrol atas sumber daya dan manfaat yang berkelanjutan dari program.

Penguatan dimensi gender dalam program pemberdayaan ekonomi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan otonomi dan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan.

- **Pertumbuhan ekonomi nasional**. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, studi World Bank[5] memperkirakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 25% pada tahun 2025 dapat menambah sekitar USD 62 miliar terhadap PDB Indonesia, atau sekitar 2,9% peningkatan. Sementara itu, proyeksi dari McKinsey Global Institute[6] bahkan lebih tinggi, yaitu hingga USD 135 miliar per tahun jika kesenjangan partisipasi gender dihilangkan dan perempuan memiliki akses dan peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki. Angka ini bukan hanya ilustrasi, melainkan cerminan dari produktivitas yang selama ini terabaikan.

- **Peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan**. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan merupakan ujung tombak dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Studi World Bank[7] menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan dasar dan jangka panjang keluarga seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan, yang dapat berdampak pada kualitas generasi berikutnya.

- **Peningkatan otonomi dan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan**. Dampak yang paling transformatif seringkali terjadi di tingkat rumah tangga. Ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri, tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan keluarga meningkat secara signifikan, terutama pada keputusan strategis seperti pendidikan, kesehatan dan investasi keluarga. Laporan studi dampak sosial PNM Mekaar menunjukkan bahwa 86% nasabah memiliki kewenangan dalam menggunakan hasil usaha, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol atas pendapatan yang dihasilkan.[8] Hal ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan secara ekonomi dan memperluas peran mereka dari sekadar ibu rumah tangga menjadi kontributor ekonomi dan pengambil keputusan yang berpengaruh, tetapi juga mendorong perubahan dinamika kuasa dalam keluarga menuju relasi yang lebih setara.

5 Why women matter for Indonesia's economic recovery, diakses pada April 2025, https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/why-women-matter-indonesias-economic-recovery

6 Closing the women's health gap: A $1 trillion opportunity to improve lives and economies, 2024, https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/closing-the-womens-health-gap-a-1-trillion-dollar-opportunity-to-improve-lives-and-economies

7 Women Economic Empowerment Study - Open Knowledge Repository - World Bank, diakses pada April 2025, https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/6bafa125-c81b-5aa9-bae3-d74e0df2859f

8 Universitas Gadjah Mada, *Studi Dampak Sosial Permodalan Usaha Mikro PNM bagi Peningkatan Kapasitas Perempuan*, Laporan Akhir untuk PT Permodalan Nasional Madani, Yogyakarta: FISIPOL UGM, Desember 2022, https://prisma.simaster.ugm.ac.id/karya_files/studi-dampak-sosial-permodalan-mikro-pnm-bagi-peningkatan-kapasitas-perempuan-di-delapan-provinsi-dcfcd07e645d245babe887e5e2daa016

Kebijakan di tingkat global dan tingkat nasional yang relevan

Berbagai dokumen dan regulasi pembangunan menunjukkan adanya komitmen formal Pemerintah Indonesia terhadap kesetaraan gender, yang diwujudkan baik melalui strategi nasional seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI), Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN PUG) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun melalui ratifikasi sejumlah komitmen/perangkat internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan menginternalisasikan kerangka kebijakan tersebut ke dalam pertimbangan desain program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok subsisten, Bank Indonesia bukan hanya berkontribusi pada pencapaian target nasional, tetapi juga dapat mendorong transformasi struktural dalam inklusi keuangan, memperluas basis pengguna sistem pembayaran formal, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dari akar rumput melalui partisipasi perempuan yang bermakna dan berkelanjutan.

Kerangka kebijakan tersebut mencakup antara lain:

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan target 5.a tentang reformasi untuk memberikan hak ekonomi yang setara kepada perempuan dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), yang menekankan perlunya pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses terhadap sumber daya produktif.
- RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional 4 (“memperkuat pembangunan sumber daya manusia ... kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan...”), Prioritas Nasional 3 (kewirausahaan dan lapangan kerja yang berkualitas), dan Prioritas Nasional 6 (pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan) secara eksplisit mendukung agenda inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan kesetaraan gender.
- SNKI dan SNKI Perempuan: Memberikan arahan strategis dan teknis untuk inklusi keuangan bagi perempuan, khususnya yang menghadapi hambatan struktural dan sosial, dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan dan akses pada produk yang sesuai kebutuhan.
- SNEKI: Menjadi kerangka kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka perluasan akses keuangan dan peningkatan produktivitas. Salah satu implementasi kerangka SNEKI adalah pemberdayaan kelompok subsisten secara inklusif dan berbasis komunitas yang terdiri dari usaha mikro subsisten. Kerangka SNEKI secara eksplisit memberi ruang bagi integrasi gender dalam pilar kebijakannya, terutama pilar edukasi dan pemberdayaan.
- Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN PUG) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT): Menyediakan kerangka kerja operasional untuk pengarusutamaan gender dan pembangunan daerah tertinggal yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk partisipasi perempuan dalam ekonomi formal dan pembangunan.

Namun, keberadaan kerangka kebijakan yang komprehensif ini tidak serta merta menjamin hasil yang inklusif dan transformatif bagi perempuan. Untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program tersebut benar-benar menjangkau kelompok perempuan yang paling rentan dan mengubah kondisi mereka, penting untuk melakukan kajian terhadap kenyataan di lapangan. Berbagai studi dan tinjauan literatur dari konteks Asia Tenggara mengungkap bahwa dibalik kebijakan yang progresif masih terdapat hambatan

struktural yang dalam dan norma sosial yang mengakar, yang membatasi efektivitas intervensi pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama ketika dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pemahaman terhadap sifat dan dinamika hambatan ini menjadi kunci dalam merancang strategi yang lebih relevan dan berdampak.

Hambatan struktural dan norma gender

Studi dari Asia Tenggara[9] menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang bersifat sistemik dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan kelompok:

Akses yang terbatas terhadap layanan keuangan formal	Banyak perempuan, terutama yang tidak memiliki KTP atau agunan, berada di sektor informal, atau tidak memiliki pendapatan tetap, menghadapi eksklusi finansial berupa kesulitan membuka rekening bank atau mengakses kredit formal. Hambatan ini semakin kompleks karena rendahnya literasi keuangan dan digital serta kurangnya kepercayaan kepada institusi formal.
Norma sosial yang membatasi mobilitas dan peran perempuan	Di banyak wilayah, norma patriarki masih kuat memposisikan perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pekerjaan perawatan tidak berbayar (*unpaid carework*) seperti pengasuhan anak dan perawatan anggota keluarga lanjut usia. Peran ganda ini, ditambah keharusan memperoleh izin dari suami atau keluarga untuk mengikuti kegiatan, seperti pelatihan di luar rumah, membatasi waktu dan mobilitas mereka. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam pelatihan maupun kegiatan kelompok.
Dinamika relasi kekuasaan dalam kelompok	Meski kelompok dibentuk sebagai wadah kolektif, dalam praktiknya seringkali bergantung pada figur sentral, seperti ketua atau pemilik usaha. Ketergantungan ini dapat menyebabkan distribusi kontrol atas pengambilan keputusan dan sumber daya menjadi tidak merata. Dalam situasi seperti ini, suara perempuan berisiko terpinggirkan, dan kelompok berpotensi memperkuat ketimpangan kuasa yang sudah ada di masyarakat.
Kurangnya intervensi berbasis kebutuhan nyata anggota	Banyak program pelatihan atau pendampingan yang bersifat *one-size-fits-all*, dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik berdasarkan gender, usia, jenis usaha, atau kapasitas anggota.

Studi-studi tersebut mengindikasikan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan partisipatif untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar mendapat manfaat yang sepadan dari program pemberdayaan kelompok.

9 Asian Development Bank. (2021). Gender equality and social inclusion assessment. Manila: ADB. https://www.adb.org/,
International Fund for Agricultural Development. (2017). Gender equality and women's empowerment: Policy. Rome: IFAD. https://www.ifad.org/en/
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). Rural women's empowerment in Southeast Asia. Rome: FAO. http://www.fao.org
International Labour Organization. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). Geneva: ILO. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/Women_men_informal_economy_statistical_picture.pdf
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2022). Gender-responsive entrepreneurship development in Asia and the Pacific. Bangkok: UNESCAP. https://www.unescap.org
UN Women. (2020). Gender equality and women's empowerment in Asia-Pacific. Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific. https://asiapacific.unwomen.org

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Women-Centered Design* (WCD) dengan metode campuran (*mixed-methods*) untuk menggali pengalaman perempuan dalam program EKI berbasis kelompok subsisten, dengan strategi sampling purposif di empat wilayah, serta analisis tematik dan data sekunder. Informasi berikut menjelaskan secara lebih detail mengenai desain penelitian, strategi pemilihan responden, alat pengumpulan data, pendekatan analisis, serta pertimbangan etika yang diterapkan dalam penelitian ini.

Pendekatan *Women-Centered Design* (WCD)

Dalam merancang intervensi maupun kebijakan yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penting untuk menyadari bahwa hambatan yang dihadapi perempuan sering kali berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini muncul dari peran sosial yang melekat, tanggung jawab pekerjaan rumah tangga (*domestic care works*) yang lebih besar, ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontrol atas penggunaan dana usaha, dan manfaat ekonomi dari program.

Karena itu, pendekatan *Women-Centered Design* (WCD) digunakan agar proses riset dan perancangan rekomendasi sepenuhnya berangkat dari pengalaman, kebutuhan, dan konteks hidup perempuan sehari-hari. WCD merupakan pendekatan holistik yang dikembangkan oleh Women's World Banking untuk menciptakan solusi yang adil, inklusif, dan tepat sasaran bagi perempuan, khususnya mereka yang berada di kelompok rentan atau kurang terlayani.[10]

Women's World Banking menerapkan pendekatan WCD dalam berbagai aspek, mulai dari riset, perancangan produk layanan keuangan bersama dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), hingga pengembangan program dan kebijakan bersama dengan regulator. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Women's World Banking bermitra dengan salah satu perusahaan dompet digital untuk melakukan penelitian, uji coba lapangan, dan mengembangkan solusi menggunakan metode WCD untuk mempromosikan pengiriman uang secara digital sebagai salah satu jenis transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja migran domestik. Dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada perempuan, penelitian ini dapat memahami tantangan dan kebutuhan pekerja migran domestik dalam menggunakan layanan keuangan digital, sehingga dapat merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam memanfaatkan layanan tersebut.

10 Mengacu ke Revolutionizing product design in financial services: A gender-inclusive approach. https://www.womensworldbanking.org/insights/report-revolutionizing-product-design-in-financial-services/

Pendekatan WCD menjadi relevan bagi Bank Indonesia dalam memperkuat efektivitas Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa perempuan belum sepenuhnya terjangkau atau belum merasakan dampak optimal, meskipun program pelatihan dan pendampingan sudah berjalan dan mayoritas pesertanya adalah perempuan.

WCD menggabungkan tiga pendekatan utama:

1. **Desain berbasis perilaku *(behavioral design)***

   WCD menggali faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan keuangan perempuan, seperti rasa percaya diri dalam mengelola uang, persepsi risiko, dan keraguan dalam menggunakan layanan keuangan karena merasa "kurang pintar". Dengan memahami ini, dapat dirumuskan rekomendasi yang bukan hanya informatif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku secara bertahap dan berkelanjutan.

2. **Pendekatan berpikir desain *(design thinking)***

   Proses perumusan rekomendasi dimulai dengan mendengarkan langsung cerita dan tantangan nyata yang dihadapi perempuan. Melalui tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*, setiap rekomendasi atau program dianalisa bersama perempuan sebagai pengguna akhir, agar dapat diterapkan secara praktis di kehidupan mereka.

3. **Lensa gender *(gender lens)***

   Pendekatan ini melihat perempuan tidak sekadar sebagai kelompok sasaran, tetapi sebagai individu yang hidup dalam struktur sosial tertentu. Dengan menggunakan lensa gender, WCD mengidentifikasi bagaimana norma, peran domestik, akses terhadap sumber daya, dan relasi kekuasaan dalam keluarga maupun komunitas memengaruhi akses perempuan ke pelatihan atau layanan keuangan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan kelompok, kontrol atas hasil usaha, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang mereka rasakan dari program EKI berbasis kelompok subsisten.

Dengan menerapkan pendekatan WCD yang mempertimbangkan dimensi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa program EKI berbasis kelompok subsisten menjangkau perempuan dan laki-laki secara lebih efektif — tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas dampak dan keberlanjutan partisipasi mereka dalam ekosistem keuangan formal.

Desain pendekatan campuran (*mixed-methods*)

Empat wilayah dipilih — Jakarta, Palu, Belitung, dan Bali — karena mewakili konteks geografis dan sosial-ekonomi yang beragam. Untuk mendukung pendekatan WCD, penelitian ini menggunakan desain metode campuran (*mixed-method*) yang menggabungkan teknik kualitatif berupa wawancara mendalam (*in-depth interviews*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*/FGD), dengan hasil analisa data *monitoring* program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap pengalaman perempuan sekaligus menyediakan konteks dan validasi terhadap temuan dari sisi kuantitatif dan programatik. (Detail metodologi terlampir dalam Lampiran 1).

Strategi pengambilan sampel dan profil responden

Pemilihan responden dilakukan secara purposif di empat (4) wilayah terhadap 9 kelompok binaan, dengan mempertimbangkan variasi karakteristik kelompok seperti kepemimpinan perempuan dan laki-laki, jenis usaha kelompok binaan (pangan, kerajinan, pertanian), status legalitas usaha kelompok binaan, maupun kanal penjualan masing-masing kelompok binaan (*offline*, *online*). Jumlah responden adalah 26 anggota dan pengurus kelompok usaha (bendahara dan ketua kelompok), 9 fasilitator/ pendamping, serta 44 *stakeholder*s dari 19 mitra pendukung program, untuk mendapatkan perspektif multipihak.

Alat pengumpulan data dan pendekatan analisis

Alat yang digunakan mencakup panduan wawancara semi-terstruktur dan panduan FGD yang dirancang dengan prinsip *Women-Centered Design* (WCD). Analisis dilakukan secara tematik untuk menarik pola pengalaman dan kendala perempuan. Data sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi dan capaian lintas jenis kelamin.

Batasan metodologi dan pertimbangan etika

Riset ini menyadari keterbatasan cakupan wilayah dan kemungkinan bias sosial, terutama terkait norma gender yang bisa memengaruhi keterbukaan responden. Selain itu, pendekatan *mixed-method*s yang digunakan dalam penelitian ini memiliki batasan tertentu, yaitu terbatasnya generalisasi hasil temuan kualitatif karena jumlah sampel terbatas dan lokasi penelitian yang dipilih secara purposif.

Untuk memitigasi keterbatasan tersebut, hasil temuan kualitatif diperkuat dengan analisis data sekunder dan diskusi multipihak melalui FGD untuk mendapatkan validasi silang yang lebih luas. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, tim peneliti juga mengutamakan pertimbangan etika dengan menggunakan prinsip persetujuan secara sadar (*informed consent*) serta menjamin perlindungan data pribadi responden. Tim peneliti juga dilatih untuk menggunakan pendekatan sensitif gender agar para responden merasa aman dan nyaman dalam berbagi pengalaman mereka.

Temuan kunci

Penelitian ini mengungkap bahwa perbedaan konteks wilayah, struktur kelompok, dan norma gender sangat memengaruhi partisipasi dan peran perempuan dalam kelompok usaha binaan. Selain itu, kesenjangan dalam kepemimpinan, literasi keuangan digital, serta akses pelatihan menjadi tantangan utama yang perlu direspon secara lebih kontekstual oleh program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) berbasis kelompok subsisten. Empat (4) bagian temuan berikut menguraikan isu-isu tersebut secara lebih mendalam.

Temuan 1

Norma gender membentuk persepsi dan pola partisipasi dalam kelompok usaha yang membuat keterlibatan perempuan sering dianggap kurang aktif atau kurang berkontribusi dibandingkan laki-laki

Memahami bagaimana norma gender memengaruhi pola partisipasi dan kepemimpinan dalam kelompok usaha adalah elemen penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak hanya menjangkau perempuan secara kuantitatif, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang bermakna dan transformatif. Tanpa kesadaran akan hambatan sosial dan dinamika relasi kuasa, partisipasi perempuan berisiko menjadi simbolik dan tidak berdampak pada peningkatan kontrol mereka atas manfaat ekonomi dari keikutsertaan sebagai anggota kelompok EKI berbasis kelompok subsisten.

Temuan di bawah ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelompok tidak hanya dibatasi oleh faktor kapasitas atau akses ekonomi, tetapi juga oleh ekspektasi domestik dan izin sosial dari pasangan atau keluarga. Norma ini berdampak pada: segregasi sektor usaha yang dapat mereka ikuti (bias sektoral berbasis gender), ketersediaan waktu yang mempengaruhi kemampuan mereka hadir dalam kegiatan rutin, serta adanya *glass ceiling*, yaitu hambatan tidak kasat mata yang membatasi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan atau berperan dalam pengambilan keputusan kelompok.

Bias sektoral berbasis gender

Norma tradisional menciptakan pembagian sektor usaha berdasarkan persepsi peran gender. Perempuan cenderung diarahkan ke sektor-sektor yang dianggap 'alami' atau 'ringan', seperti kerajinan tangan, atau yang merupakan perluasan tugas domestiknya yakni pekerjaan rumah tangga, seperti kuliner. Sementara itu, laki-laki lebih banyak ditemukan di sektor yang dipersepsikan membutuhkan tenaga fisik dan kepemimpinan publik lebih besar seperti pertanian atau distribusi logistik.

Pembagian ini tidak hanya mencerminkan stereotip gender, tetapi juga memengaruhi peluang pengembangan usaha dalam jangka panjang. Sektor yang didominasi laki-laki cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar, modal, dan jaringan usaha, sementara sektor yang didominasi perempuan sering kali menghadapi keterbatasan skala dan daya saing akibat marjinalisasi dalam rantai nilai usaha.

Tabel 1.
Perbandingan sektor kelompok usaha perempuan dan laki-laki

Aspek	Perempuan	Laki-laki
Sektor usaha dominan	Kerajinan tangan, kuliner	Pertanian, perikanan, distribusi logistik
Alasan/ norma sosial	Perempuan dipandang lebih mampu mengerjakan hal-hal di sektor yang dianggap ringan atau kelanjutan dari peran domestik	Laki-laki dipersepsikan mengerjakan hal-hal di sektor yang berhubungan dengan pekerjaan fisik dan pengambilan keputusan strategis
Skala usaha	Lebih kecil	Lebih besar
Dampak terhadap akses pasar	Terbatas, sering kali hanya lingkup lokal atau komunitas, sangat bergantung pada jaringan informal	Lebih luas, mencakup pasar regional/nasional, didukung jaringan formal dan akses logistik lebih baik
Dampak terhadap akses ke modal & jaringan	Sering kali terbatas, daya saing rendah, sulit memperluas skala usaha	Lebih mudah mendapatkan modal dan jaringan bisnis, potensi berkembang lebih besar

Norma gender dan izin sosial

Perempuan sering kali perlu bernegosiasi dengan struktur sosial yang menempatkan mereka dalam peran domestik utama. Di beberapa wilayah, keputusan perempuan untuk aktif di kelompok usaha harus melalui persetujuan suami atau keluarga. Sebaliknya, pemberitahuan suami kepada istri/keluarga umumnya lebih bersifat informatif dan bukan permisif, yang mencerminkan asimetri kuasa dalam pengambilan keputusan mobilitas. Sebagaimana disampaikan oleh para responden perempuan, kutipan-kutipan berikut menggambarkan bagaimana norma patriarki masih membatasi waktu dan ruang gerak perempuan.

> *Kalau saya ikut kegiatan kelompok, anak-anak jadi tidak ada yang jaga.* ***Suami saya juga tidak suka kalau saya sering keluar rumah.***

> *...jadi walau bagaimanapun,* ***ibu rumah tangga kodratnya ya tetap ibu rumah tangga...*** *Kalaupun mau karir, tetap jangan sampai meremehkan tugas keluarga, anak terutama.*

> *Setelah itu saya berniat bekerja lagi, tapi suami saya tidak mengijinkan. Pada waktu itu suami saya dirumahkan (PHK), dan waktu saya bilang mau bekerja, suami saya bilang* ***"Masa istri yang kerja, suami di rumah?"****.*

> ***Saya lebih rela untuk kehilangan waktu, mengurangi porsi penghasilan*** *dibandingkan meninggalkan keluarga.*

Sebaliknya, dalam konteks yang lebih terbuka — seperti di lingkungan urban atau komunitas dengan norma yang lebih egaliter — perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Namun, ketersediaan ruang dan kesempatan ini tidak selalu diikuti dengan akses yang setara pada posisi strategis di kelompok. Struktur kelompok yang tidak inklusif tetap dapat membatasi perempuan pada peran teknis, bukan strategis.

Sebagai contoh, perempuan sering kali hanya diberi tanggung jawab teknis yang merupakan perluasan dari peran domestiknya seperti mencatat notulensi rapat, mengelola pencatatan keuangan, sementara posisi strategis seperti ketua kelompok atau pengambil keputusan utama lebih sering dipegang oleh laki-laki. Kondisi ini menciptakan *glass ceiling* dalam kepemimpinan kelompok, batas tak terlihat yang menghalangi perempuan untuk naik ke posisi pengambil keputusan. Akibatnya, meskipun mereka dapat berperan aktif secara administratif dan operasional, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas, yang akhirnya mempertahankan ketimpangan kuasa di tingkat mikro kelembagaan.

Dinamika partisipasi dan kontribusi ekonomi

Motivasi utama perempuan untuk bergabung ke kelompok usaha adalah menambah penghasilan keluarga, yang kerap diposisikan sebagai “tambahan” terhadap nafkah utama suami. Namun, sehubungan dengan norma gender yang menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga, mereka cenderung memilih pekerjaan yang fleksibel – dapat dilakukan dari rumah dengan jam kerja yang dapat disesuaikan – sehingga memungkinkan mereka menjaga keseimbangan antara peran domestik dan kontribusi ekonomi. Selain aspek pendapatan, keterlibatan perempuan dalam kelompok usaha juga didorong oleh kebutuhan untuk bersosialisasi, belajar dan berbagi pengetahuan dengan sesama anggota kelompok. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan akan ruang sosial dan pengakuan di luar ranah domestik, yang menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan perempuan.

Di sisi lain, motivasi laki-laki untuk bergabung ke kelompok usaha adalah untuk mendapatkan penghasilan sebagai pencari nafkah utama. Berbeda dengan perempuan, laki-laki tidak mencari pekerjaan yang fleksibel karena norma sosial dan gender justru mendorong mereka untuk fokus pada peran produktif, tanpa tuntutan untuk menyeimbangkan tanggung jawab domestik atau pengasuhan anak. Kondisi ini memberikan laki-laki keleluasaan mobilitas dan waktu untuk memilih serta menjalankan pekerjaan.

Meskipun berperan penting dalam menopang ekonomi rumah tangga, kontribusi perempuan sering kali tidak diakui secara setara, baik oleh lingkungan maupun oleh diri mereka sendiri, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *invisible labour* atau pekerjaan yang tidak terlihat. Pengakuan atas kontribusi ekonomi perempuan merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kemandirian (*agency*) perempuan. Ketika perempuan memperoleh dukungan sosial, terutama dari pasangan, mereka menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kemandirian finansial, serta kemampuan mengambil keputusan di tingkat rumah tangga maupun kelompok. Dukungan ini berfungsi sebagai *social enabler* yang mampu memutus siklus ketergantungan, memperkuat kepercayaan diri, dan membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna dan transformatif – tidak sekadar instrumental.

Suara keterwakilan lintas gender dalam struktur kepemimpinan kelompok

Studi terhadap kelompok usaha di empat (4) wilayah menunjukkan bahwa komposisi gender dalam kelompok usaha juga memengaruhi tingkat partisipasi perempuan:

- **Kelompok dengan kepemimpinan perempuan dan mayoritas anggota perempuan** umumnya menunjukkan praktik diskusi yang lebih setara dan adaptif terhadap kebutuhan waktu dan ruang aman bagi perempuan. Pola ini mendukung terbentuknya *collective agency* atau kemandirian bersama di antara anggota perempuan. Namun demikian, kelompok ini kerap menghadapi tantangan teknis dan akses pasar, yang mencerminkan keterbatasan akses perempuan terhadap jaringan pasar dan modal yang lebih luas.
- **Kelompok dengan kepemimpinan laki-laki dan mayoritas anggota laki-laki** cenderung memiliki struktur dan operasional yang kuat, tetapi sering kali memperkuat pola subordinasi terhadap perempuan dan membatasi ruang aktualisasi mereka dalam pengambilan keputusan.
- **Kelompok dengan ketua laki-laki dan mayoritas anggota perempuan** seringkali menunjukkan ketergantungan tinggi pada figur sentral. Dalam hal ini, partisipasi perempuan lebih banyak terfokus pada pelaksanaan kegiatan dibanding pada penentuan arah strategis. Pola ini memperlihatkan bentuk ketidakadilan gender yang melanggengkan subordinasi dan memperluas peran domestik perempuan ke ranah kelompok.

Tabel 2.

Pengaruh struktur kepemimpinan terhadap dinamika kelompok

	Komposisi kepemimpinan		
	Ketua perempuan, mayoritas anggota perempuan	**Ketua laki-laki, mayoritas anggota laki-laki**	**Ketua laki-laki, mayoritas anggota perempuan**
Pola keputusan	Lebih **responsif terhadap kebutuhan perempuan** Ketua jarang mengalami *pushback* (penolakan/ keberatan)	Umumnya **merepresentasikan kebutuhan laki-laki**, dengan **asumsi** bahwa kebutuhan **gender bersifat universal** Ketua jarang mengalami *pushback* (penolakan/ keberatan	**Keputusan** cenderung **merefleksikan sudut pandang laki-laki** sehingga muncul **resistensi pasif** dan *pushback* (penolakan/ keberatan) dari **anggota perempuan**
Keterlibatan anggota	**Tidak merata** Tanggung jawab cenderung menumpuk pada pengurus karena anggota perempuan memiliki tanggung jawab domestik	**Lebih merata** dibanding kelompok mayoritas perempuan karena laki-laki memiliki *privilege* waktu akibat minimnya tanggung jawab domestik	**Rendah** Keterlibatan anggota perempuan **terbatas** karena tanggung jawab domestik (peran ganda)
Peran berdasarkan gender	Perempuan dominan di peran administratif	Urusan administratif jarang menjadi beban laki-laki karena cenderung didelegasikan kepada anggota perempuan (jika ada)	Perempuan dominan di peran administratif akibat stereotip gender
Tantangan utama	Lemah di pemasaran & SDM penjualan **Semangat kolektif menurun** jika manfaat ekonomi tidak jelas	Lemah di pemasaran & SDM penjualan **Semangat kolektif relatif stabil** karena usaha adalah nafkah utama sesuai norma gender	Lemah di pemasaran & SDM penjualan **Semangat kolektif menurun** jika manfaat ekonomi tidak jelas

Temuan 2

Karakteristik anggota dan model usaha menentukan arah keberlanjutan kelompok usaha dan kebermanfaatan bagi anggotanya

Temuan ini menyoroti bagaimana variasi geografis dan sosial-ekonomi di masing-masing wilayah berpengaruh langsung terhadap struktur, dinamika, dan keberfungsian kelompok usaha binaan, memberikan konteks yang unik dimana norma gender beroperasi dengan cara yang berbeda. Selain itu, tipe pembentukan kelompok dan model pengelolaan usaha juga mencerminkan adanya pola adaptasi yang berbeda dalam menjawab tantangan lokal serta menciptakan ruang partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anggota, khususnya perempuan. Kemudian, identifikasi persona[11] memberikan gambaran mendalam mengenai variasi motivasi, tantangan setiap representasi individu, serta potensi yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan dan intervensi pemberdayaan kelompok binaan di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih personal dan tepat sasaran, mengakui bahwa perempuan dan laki-laki bukanlah kelompok yang seragam.

Pemahaman atas asal-usul kelompok dan dinamika internal seperti relasi sosial, distribusi peran, dan posisi perempuan di dalam kelompok menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu kelompok dapat bertumbuh dan berfungsi secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut yang menentukan apakah kelompok dapat menjadi ruang pembelajaran dan kemajuan bersama, atau justru terbatas oleh pola relasi yang tidak seimbang di antara anggotanya.

11 Persona dalam konteks riset, desain produk, atau perencanaan program adalah representasi dari kelompok pengguna atau sasaran yang didasarkan pada data. Satu persona mewakili banyak individu yang punya karakteristik serupa. Persona umum digunakan untuk membantu memahami karakteristik, kebutuhan, perilaku, dan tantangan utama yang dialami oleh kelompok sasaran.

Karakteristik kelompok

Penelitian dilakukan di empat (4) wilayah berbeda — Jakarta, Belitung, Bali, dan Palu — yang masing-masing memiliki karakter geografis, sosial, konteks gender, dan ekonomi yang unik.

Gambar 1.
Lokasi penelitian

Jakarta

Kelompok di Jakarta mencerminkan kelompok usaha yang bergerak di sektor makanan olahan. Meskipun memiliki akses pasar yang luas dan dinamis, kelompok menghadapi tantangan dalam menjaga kontinuitas produksi akibat persaingan dan keterbatasan waktu anggota yang umumnya memiliki pekerjaan utama.

Belitung

Didominasi kelompok berbasis perikanan, produk laut olahan, dan kerajinan berbasis sumber daya alam lokal. Keterbatasan infrastruktur dan posisi geografis menjadi hambatan utama dalam mengakses pasar dan distribusi produk.

Bali

Kelompok usaha berfokus pada sektor kerajinan dengan basis komunitas adat atau desa wisata. Kelompok di Bali cenderung kuat secara budaya, dengan aktivitas ekonomi yang bergantung dengan pariwisata lokal.

Palu

Wilayah ini memiliki karakter pertanian dan perikanan sebagai fokus utama kelompok. Kelompok usaha terbentuk secara organik dari latar belakang sosial yang serupa, dengan permasalahan utama berupa keterbatasan modal usaha dan infrastruktur pendukung.

Kelompok usaha yang dikaji bergerak pada empat sektor utama:

- Olahan pangan: seperti produk makanan ringan lokal dan makanan tradisional.
- Kerajinan tangan: berupa tenun, anyaman, souvenir khas, dan produk kreatif lokal lainnya.
- Pertanian: mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan usaha tani organik.
- Perikanan: meliputi produk olahan ikan, hasil laut segar maupun kering.

Riset ini juga mengidentifikasi **dua dimensi penting** dalam dinamika pembentukan kelompok binaan, yaitu **tipe pembentukan kelompok** dan **model pengelolaan usahanya**. Kedua dimensi ini saling memengaruhi dalam membentuk pola partisipasi, solidaritas, serta efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan ekonominya.

Tipe pembentukan kelompok menunjukkan bagaimana suatu kelompok terbentuk, apakah tumbuh secara organik dari relasi sosial anggota atau terbentuk secara programatik melalui intervensi eksternal seperti program pemerintah atau lembaga mitra.

Gambar 2.
Tipe pembentukan kelompok berdasarkan asal-usul pembentukannya

Kelompok organik

Kelompok organik tumbuh secara alami dari relasi sosial dan kedekatan antar anggota, seperti kesamaan tempat tinggal, pengalaman usaha, atau keterikatan komunitas. Tipe ini cenderung memiliki tingkat solidaritas dan rasa saling percaya yang tinggi. Namun, kelompok organik umumnya tidak memiliki struktur organisasi yang kuat dan perencanaan strategis yang sistematis. Dinamika pengelolaan kegiatan kelompok cenderung informal dan sangat bergantung pada hubungan interpersonal antar anggota.

Kelompok programatik

Kelompok progmatik, sebaliknya, terbentuk melalui intervensi eksternal seperti program pemerintah atau inisiatif lembaga mitra yang pernah berjalan sebelumnya (misalnya program pendampingan dari instansi Kementerian lain, program pemerintah daerah seperti *One* Kecamatan, *One Center of Entepreneurship* dan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah). Kelompok ini lebih terstruktur secara administratif dan memiliki sistem pelaporan serta pembagian peran yang jelas. Namun, ikatan sosial antara anggota masih lemah.

Sementara itu, **model pengelolaan usaha** menunjukkan cara kelompok menjalankan kegiatan ekonominya, apakah dikelola secara kemitraan dengan struktur hierarki, atau secara kolektif dengan prinsip kesetaraan.

Gambar 3.
Model usaha kelompok berdasarkan cara menjalankan usaha

Model kemitraan

Model kemitraan memiliki struktur vertikal dengan keputusan terpusat (*top-down*), sering kali didominasi oleh pemilik usaha yang membeli produk kelompok binaan, atau oleh ketua kelompok yang berperan seperti pengepul. Dalam model ini, anggota biasanya mendapatkan kompensasi berdasarkan kontribusi kerja dalam bentuk upah atau jasa. Keunggulan model ini terletak pada stabilitas pengelolaan produksi karena umumnya sudah memiliki mitra usaha atau saluran distribusi tetap. Namun, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan proses inovasi usaha cenderung terbatas, sehingga potensi pengembangan kolektif tidak sepenuhnya terwujud. Model ini juga memiliki risiko tinggi dalam mereproduksi ketimpangan gender, terutama bagi perempuan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya maupun mengambil keputusan strategis.

Model kolektif

Model kolektif, sebaliknya, bersifat horizontal dengan prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Semua anggota memiliki suara dalam menentukan arah usaha, sementara pembagian hasil dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama. Model ini berpotensi besar mendorong pemberdayaan yang transformatif, karena memperkuat rasa memiliki dan solidaritas antar anggota. Namun, tantangan utama terletak pada aspek efisiensi operasional, pemasaran, serta ketersediaan peran profesional khusus seperti keuangan atau logistik, yang sering kali belum tersedia secara sistematis.

Variasi kombinasi pola pembentukan dan model usaha, dan implikasinya

Temuan riset menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tidak semua kelompok dapat dikategorikan secara kaku. Beberapa kelompok menunjukkan kombinasi antara pendekatan kolektif dan struktur kemitraan, atau berkembang dari pola programatik menjadi lebih organik. Namun, pola yang paling banyak muncul dalam penelitian ini adalah kelompok kolektif-organik, kolektif-programatik, dan kemitraan-organik.

Masing-masing kombinasi menciptakan ekosistem kelompok berbeda yang berimplikasi langsung terhadap ruang partisipasi dan kemandirian (*agency*) perempuan. Ketiganya memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri terkait stabilitas pasar, inovasi internal, serta yang paling krusial yakni distribusi kontrol atas manfaat ekonomi. Perbedaan tersebut terlihat nyata dalam bagaimana anggota merespon keputusan, menjalankan peran, dan membangun komitmen jangka panjang dalam kelompok, yang bagi perempuan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana struktur kelompok mampu mengakomodasi keterbatasan waktu dan mobilitas mereka.

Bagi Bank Indonesia, memahami variasi ini penting agar program tidak hanya menekankan pencapaian kuantitatif (seperti jumlah kelompok atau peserta perempuan), tetapi juga menjamin kualitas partisipasi dan kontrol perempuan atas hasil usaha. Tanpa pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap dinamika kelompok, risiko keterlibatan simbolik akan terus terjadi.

Untuk memperjelas perbedaan karakteristik dan dampaknya, khususnya bagi perempuan, variasi kombinasi pola pembentukan dan model usaha dipetakan dalam diagram berikut.

Gambar 4.
Variasi pola pembentukan dan model usaha kelompok beserta karakteristiknya

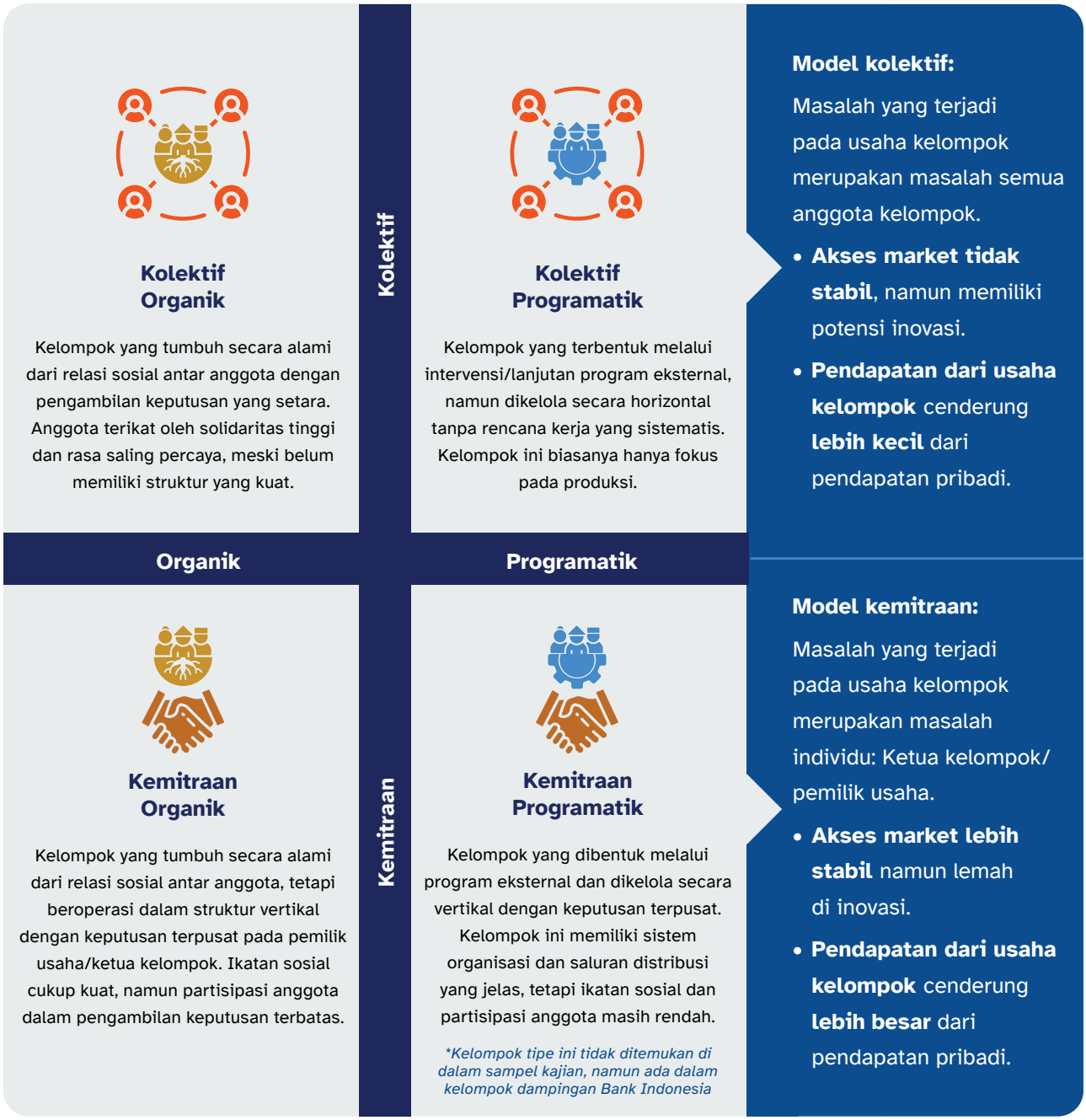

Dalam kajian ini, keempat variasi model usaha ditemukan pada beberapa sektor yang berbeda. Model kolektif organik banyak ditemukan di sektor pertanian, sedangkan kolektif programatik muncul di sektor olahan pangan dan kerajinan. Kemitraan organik ditemukan di sektor pertanian dan kerajinan (khususnya tenun). Sementara itu, kemitraan programatik tidak ditemukan dalam sampel kajian ini, namun tercatat ada pada kelompok dampingan Bank Indonesia di sektor pertanian.

Masing-masing memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri, mulai dari stabilitas pasar, potensi inovasi, hingga kontrol terhadap pendapatan kelompok (Gambar 5).

Gambar 5.

Variasi pola pembentukan dan model usaha kelompok beserta tantangan dan dampaknya

Pola pembentukan - model usaha	Kolektif - Organik	Kolektif - Programatik	Kemitraan - Organik
Kelebihan	Solidaritas dan partisipasi tinggi karena terbentuk dari relasi sosial alami (desa, komunitas, dll). Pengambilan keputusan bersifat musyawarah dan setara. Potensi inovasi tinggi karena tidak ada dominasi aktor tunggal.	Memiliki struktur administratif dasar karena berasal dari pelatihan/program terdahulu. Tetap menerapkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan.	Struktur operasional rapi dan efisien. Akses pasar stabil karena dipimpin oleh aktor dominan yang memiliki koneksi. Produksi dan pemasaran berjalan terorganisir.
Tantangan	Tidak memiliki sistem pemasaran yang mapan; akses pasar fluktuatif. Minim perencanaan strategis dan struktur usaha profesional. Ketergantungan tinggi pada semangat kolektif; rentan jika motivasi menurun.	Relasi sosial antaranggota masih lemah; belum tumbuh secara organik. Fokus pada pelatihan/produksi jangka pendek; tidak memiliki arah strategis. Akses pasar belum stabil dan sistem kepemilikan belum kokoh.	Pengambilan keputusan *top-down*; dominasi pemilik usaha atau ketua. Partisipasi anggota hanya pada pelaksanaan teknis. Inovasi terbatas karena tidak difasilitasi kecuali oleh pemimpin.
Dampak terhadap anggota kelompok	Perempuan memiliki ruang besar untuk terlibat aktif dan menyampaikan suara. Skema pembagian hasil didiskusikan bersama, sehingga anggota memiliki peluang untuk turut mengontrol distribusi pendapatan. Namun, saat manfaat ekonomi tidak langsung terasa, partisipasi bisa menurun karena beban domestik menjadi prioritas.	Perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan, tetapi belum memiliki posisi kuat dalam arah usaha. Kontrol terhadap pendapatan kelompok terbatas karena pembagian hasil belum jelas. Rasa memiliki yang lemah memengaruhi keberlanjutan partisipasi.	Perempuan umumnya hanya berperan sebagai pelaksana; tidak terlibat dalam perencanaan. Skema upah membatasi kontrol anggota atas hasil usaha. Peran perempuan bersifat tambahan, bukan bagian dari kepemilikan atau pengelolaan.

Persona anggota

Meski pola pembentukan dan model usaha memberikan kerangka untuk memahami dinamika kelompok, tetap diperlukan lensa yang lebih personal untuk memahami bagaimana individu — terutama perempuan — berpartisipasi dan mengambil peran. Pendekatan persona membantu menggali lebih dalam realitas hidup setiap anggota yang kompleks, melampaui struktur kelompok yang tampak di permukaan. Studi ini mengidentifikasi lima persona utama yang mencerminkan variasi partisipasi, motivasi, serta kapasitas literasi dan akses keuangan di antara anggota kelompok binaan.

Gambar 6.
Persona utama penelitian

The social go-getter	***The flexible hustler/Steady mom-preneur***	***Visioner mom-preneurs/ Consistent grower***	***The steady entrepreneurs***	***The dynamic agripreneurs***
Ibu Erna 52 tahun	**Ibu Rini** 43 tahun	**Ibu Rosi** 35 tahun	**Bapak Isnan** 37 tahun	**Bapak Edi** 53 tahun
Adalah sosok yang aktif di masyarakat dan berperan sebagai anggota PKK, KWT, dan pengurus posyandu. Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, Bu Erna aktif dalam forum-forum dan kegiatan kelompok komunitas.	Menjalani kesehariannya dengan fokus pada keluarga, namun tetap berusaha berkontribusi secara ekonomi melalui usaha yang bisa dikerjakan dari rumah. Meskipun bersifat tambahan, tetapi punya dampak dalam mencukupi kebutuhan harian.	Perempuan dengan semangat usaha yang kuat. Bu Rosi memandang kelompok sebagai tempat untuk memperluas jaringan dan kapasitas bisnis. Untuk usahanya, Bu Rosi benar-benar memikirkan pengembangan usaha ke depan.	Menjalankan usaha kecil berbasis keterampilan teknis yang dia pelajari secara otodidak. Usahanya dikelola sendiri dan telah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pak Isnan konsisten menekuni bidang ini karena ingin mandiri secara ekonomi.	Berkomitmen pada pengembangan usaha taninya yang dimulai dari nol. Tanpa latar belakang pertanian, dia menekuni usaha karena melihat potensi ekonomi yang besar. Baginya, usaha pertanian adalah sumber penghidupan utama.

Gambar 7.

Karakteristik persona

Faktor	**Erna** *The social go-getter*	**Rini** *The flexible hustler /Steady mom-preneur*	**Rosi** *Visioner mom-preneurs/ Consistent grower*	**Isnan** *The steady entrepreneurs*	**Edi** *The dynamic agripreneurs*
Profil usaha	Tidak punya usaha sendiri, andalkan penghasilan suami	Punya usaha tapi berbasis rumahan dan fleksibel	Usaha rumah skala kecil-menengah, kontibusi nyata ekonomi keluarga	Aktivitas ekonomi berbasis keterampilan, usaha skala rumahan	Berkomitmen jangka panjang, fokus pada produktivitas kebun pribadi dan kelompok
Motivasi bergabung kelompok	Ingin belajar dan aktif di komunitas	Cari penghasilan tetap tanpa harus sering tinggalkan rumah	Ingin belajar, sosialisasi, menambah penghasilan	Tertarik pelatihan & ajakan individu; motivasi personal kuat untuk berkembang	Tertarik karena potensi ekonomi pertanian dan ajakan tokoh lokal
Literasi keuangan	Paham kegunaan tabungan, tidak ada pencatatan dan pemisahan uang	Kelola penghasilan bersama suami; tidak ada pencatatan dan pemisahan uang	Pisahkan uang usaha dan pribadi; catatan uang secara manual.	Kelola uang sendiri; mulai mencatat manual tapi tidak rutin	Mulai mencatat manual. Pisahkan uang usaha dan pribadi
Akses layanan keuangan	Punya atau tidak punya rekening; transaksi tunai dominan	Punya rekening, tidak aktif transaksi; lebih pasif, hanya untuk terima uang	Punya rekening & dompet digital; aktif transaksi	Punya rekening pribadi, digunakan untuk simpan/ terima penghasilan	Punya rekening di bank konvensional atas nama sendiri atau istri
Literasi keuangan digital	Rendah, tidak pernah pakai produk keuangan digital	Rendah; jarang pakai produk keuangan digital	Medium/sedang; sebagian cukup paham pakai dompet digital	Medium/sedang; sebagian cukup paham pakai dompet digital	Mulai terbuka terhadap beberapa produk keuangan digital, seperti dompet digital dan QRIS
Peran domestik & sosial	Ibu rumah tangga aktif, suami mendukung	Prioritaskan peran domestik, waktu tersisa digunakan secara fleksibel untuk kelompok	Prioritaskan peran domestik, tapi bisa bagi waktu untuk kelompok jika diperlukan; dukungan keluarga kuat	Tinggal sendiri/ merantau/kepala keluarga; relatif mandiri	Peran domestik dikelola bersama istri
Pengambilan keputusan	Diskusi dengan suami untuk keputusan besar	Diskusi dengan suami; ibu pegang keputusan harian	Mandiri dalam keputusan harian, diskusi untuk keputusan besar	Ambil keputusan sendiri	Diskusi dengan istri untuk keputusan besar; Teknis usaha ditentukan sendiri

Setiap anggota membawa motivasi, kapasitas, dan keterbatasannya masing-masing, yang memengaruhi **akses** terhadap sumber daya, **partisipasi** dalam kegiatan kelompok, **kontrol** atas pengambilan keputusan di dalam kelompok usaha, atau **manfaat** yang diperoleh dari hasil usaha. Variasi inilah yang menentukan sejauh mana program pemberdayaan mampu menyentuh akar kesenjangan dan mentransformasi kehidupan perempuan secara nyata.

Pendekatan persona dalam studi ini bertujuan menangkap keragaman tersebut, sekaligus mengungkap kesenjangan gender di setiap dimensi APKM. Melalui pendekatan ini, terlihat bahwa sebagian anggota menunjukkan kepemimpinan alami yang tumbuh dari pengalaman usaha dan jejaring sosial, sementara sebagian lainnya menghadapi keterbatasan partisipasi akibat peran ganda, ketergantungan finansial, atau rendahnya literasi keuangan – yang berdampak pada minimnya kontrol terhadap keputusan kelompok usaha dan terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan.

Tabel 3.
Analisa APKM (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) dalam persona

Persona	Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
Social go-getter	●●○○	●●○○	●○○○	●●○○
Flexible hustler/steady mom-preneur	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Visioner mom-preneurs/ consistent grower	●●○○	●●○○	●●●○	●●○○
The steady entrepreneurs	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Dynamic agripreneurs	●●●●	●●●●	●●●○	●●●●

Catatan:

●○○○	Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang **sangat minim**. Hampir tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, akses layanan terbatas, dan manfaat ekonomi kecil.
●●○○	Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang **rendah**, namun mulai terlihat peluang untuk terlibat meskipun masih terbatas dan tidak konsisten
●●●○	Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat **cukup besar**, namun masih terdapat beberapa hambatan struktural dan norma gender.
●●●●	Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang **tinggi**, berperan aktif dalam pengambilan keputusan, mendapat layanan formal, dan merasakan manfaat ekonomi yang signifikan.

Bagi Bank Indonesia, identifikasi persona ini penting untuk mengidentifikasi *local champion* — anggota dengan potensi kepemimpinan dan pengaruh sosial — yang dapat menjadi penggerak keberlanjutan partisipasi kelompok. Pendekatan ini juga membantu program EKI berbasis kelompok subsisten merancang intervensi yang lebih responsif gender, dengan menyesuaikan desain program terhadap kebutuhan dan keterbatasan nyata anggota, alih-alih memperlakukan kelompok sebagai entitas yang homogen.

Temuan 3

Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan penggunaan layanan keuangan formal di tingkat kelompok, lemahnya ekosistem digital dan terbatasnya kapabilitas menyebabkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh anggota, khususnya perempuan, belum optimal

Temuan ini menyoroti masih terbatasnya adopsi layanan keuangan formal dan digital dalam pengelolaan usaha kelompok binaan. Meskipun sebagian besar kelompok memiliki rekening bank atas nama kelompok atau ketua, penggunaannya masih terbatas pada kebutuhan administratif, seperti pencairan bantuan program atau pembelian bahan baku. Mekanisme pencatatan keuangan pun masih dilakukan secara manual dan belum sistematis, bergantung pada kapasitas pengurus yang sebagian besar belum memiliki pelatihan dasar akuntansi.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan dan digital di tingkat kelompok usaha bukan hanya pelengkap, melainkan prasyarat penting untuk mewujudkan inklusi keuangan yang produktif dan berkelanjutan. Tanpa intervensi yang responsif gender terhadap kesenjangan literasi dan kapasitas pencatatan, program pemberdayaan berisiko memperlebar ketimpangan akses. Hal ini terutama terjadi pada kelompok yang dipimpin atau didominasi oleh anggota dengan kemampuan literasi rendah, baik dalam pencatatan manual maupun, ke depan, jika beralih ke sistem digital.

Adopsi layanan keuangan digital di tingkat kelompok belum mendorong praktik individu: Tantangan dan peluang untuk pendekatan yang lebih personal

Adopsi digitalisasi di tingkat kelompok tidak serta-merta meningkatkan literasi atau kebiasaan keuangan digital di tingkat individu, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara adopsi kelembagaan dan pemberdayaan individu. Meskipun beberapa kelompok telah mengenal penggunaan QRIS untuk transaksi usaha, hal ini belum berdampak pada akses QRIS oleh individu anggota kelompok.

Data kajian ini menunjukkan bahwa meskipun 88% anggota memiliki rekening tabungan formal atas nama sendiri, sebagian besar penggunaannya bersifat pasif — terbatas untuk menerima transfer — tanpa disertai pencatatan pengeluaran pribadi secara rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan rekening belum berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan mengelola keuangan secara aktif. Sebanyak 12% lainnya masih menggunakan rekening atas nama pasangan, yang mencerminkan keterbatasan kontrol langsung terhadap keuangan pribadi.

Sementara itu, penggunaan *e-wallet* (35%) dan *mobile banking* (23%) dari keseluruhan sampel[12] masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa layanan keuangan digital belum menjadi bagian dari keseharian anggota, terutama untuk mengelola usaha atau pengeluaran rumah tangga. Kepemilikan akses terhadap layanan kredit juga masih terbatas, dimana 27% anggota yang memiliki kredit konsumtif, yang umumnya tidak terkait dengan pengembangan usaha produktif.

Penting untuk dicatat bahwa situasi ini tidak hanya mencerminkan kurangnya pengetahuan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan finansial, baik di rumah tangga maupun di kelompok. Dalam konteks tersebut, upaya memperluas akses keuangan digital perlu disertai pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kapasitas individu. Membangun kebiasaan keuangan digital bukan hanya terkait pembukaan rekening dan mengenalkan fitur, tetapi tentang mendorong perubahan perilaku yang memungkinkan anggota kelompok binaan — khususnya perempuan — merasa aman, mampu, dan memiliki kontrol dalam menggunakan layanan pembayaran digital secara mandiri dan berkelanjutan.

Tantangan dalam pencatatan dan transparansi informasi keuangan

Pencatatan keuangan kelompok sebagian besar masih dilakukan secara manual, sering kali oleh satu orang pengurus (ketua atau bendahara), tanpa sistem yang baku. Hal ini menciptakan beban kerja tersentralisasi, meningkatkan risiko kesalahan atau miskomunikasi, serta melemahkan transparansi di dalam kelompok. Tanpa panduan distribusi hasil usaha yang jelas dan mekanisme pencatatan yang sederhana, anggota kelompok cenderung pasif dan tidak memiliki pemahaman utuh tentang posisi keuangan kelompok.

Ketergantungan pada transaksi tunai dan pencatatan manual juga membuat kelompok kesulitan membangun rekam jejak keuangan yang kredibel, sehingga mempersempit peluang untuk mengakses pembiayaan formal.

12 Data diambil dari total sample anggota dan pengurus N=26.

Gambar 8.
Ilustrasi cerita bendahara kelompok

Ani, sang bendahara muda yang memikul beban sendirian

Di tengah kesibukan kelompok usaha kecil, Ani seorang perempuan muda lulusan Akuntansi, memegang tanggung jawab besar sebagai bendahara. Setiap alur pemasukan dan pengeluaran dicatat olehnya secara teliti. Ia menyusun laporan keuangan kelompok, mencatat setiap pembelian bahan, hasil penjualan, hingga pengeluaran operasional.

Ia sendirian mengelola pencatatan dan menyusun laporan, tanpa ada anggota lain yang benar-benar memahami atau terlibat aktif dalam prosesnya. Setiap kali laporan disampaikan, anggota kelompok kerap meminta penjelasan ulang secara lisan, seolah laporan yang telah ditulis tidak cukup jelas atau sulit dipahami.

Pencatatan penjualan sehari-hari pun dilakukan di lembaran-lembaran kertas seadanya. Tak jarang, catatan tercecer atau tidak langsung terdokumentasi rapi. Ani harus menyempatkan waktu setiap akhir pekan untuk mentransfer semua data penjualan manual ini ke aplikasi SIAPIK. Kegiatan ini sering ia lakukan di luar jam kerja kelompok, dalam waktu pribadinya sendiri, seringnya di malam hari.

Kondisi ini membuat Ani khawatir. Ia menyadari bahwa sebagian besar anggota belum terbiasa dengan laporan keuangan. Mereka bukan tidak peduli, namun terbatas oleh tingkat literasi dan pencatatan keuangan yang berbeda. Ini menimbulkan ketergantungan penuh kepada dirinya sebagai bendahara, tanpa sistem pengecekan silang atau distribusi tanggung jawab yang memadai.

Jika suatu hari Ani tidak bisa menjalankan tugasnya, hampir tidak ada anggota lain yang siap melanjutkan. Ia berharap ada pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis usaha, tetapi juga memperkuat pemahaman dasar keuangan dan pencatatan sederhana yang dapat dipahami serta digunakan oleh seluruh anggota kelompok.

Ketimpangan literasi digital antar anggota

Literasi digital sangat bergantung pada individu pengurus, menciptakan ketergantungan dan konsentrasi pengetahuan yang berpotensi disalahgunakan. Dalam banyak kasus, hanya ketua atau bendahara yang mampu menggunakan aplikasi transaksi atau pencatatan keuangan. Sementara mayoritas anggota, terutama perempuan paruh baya, belum nyaman menggunakan teknologi dasar keuangan digital, karena kurangnya paparan dan kesempatan belajar dalam lingkungan yang mendukung.

Meskipun secara kepemilikan perangkat seluruh anggota dan pengurus terhubung dengan memiliki HP/ *smartphone*[13], hanya 19% memiliki akses terhadap laptop atau komputer.

Selain itu, kepemilikan perangkat ini belum diterjemahkan ke dalam penggunaan aktif untuk pencatatan atau layanan keuangan digital. Hambatannya bukan hanya pada aspek teknis, tapi juga norma sosial dan relasi kuasa dalam kelompok, yang membuat mayoritas anggota kurang terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis data keuangan.

Tanpa strategi pelatihan yang partisipatif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau semua anggota, ketimpangan digital ini akan terus mempersempit ruang partisipasi dan memperlebar kesenjangan informasi antar anggota kelompok, yang berpotensi mengukuhkan hierarki pengetahuan yang timpang.

Siklus keuangan pendek dan minimnya perencanaan

Kelompok-kelompok yang ditemui dalam kajian ini cenderung memiliki siklus arus kas yang pendek, dengan skala kegiatan kecil dan pola pencatatan keuangan yang bervariasi. Perbedaan dalam pola pencatatan ini berkaitan erat dengan stabilitas pendapatan usaha dan ritme produksi kelompok:

13 Data diambil dari total sample anggota dan pengurus N=26.

- **Kelompok tanpa atau dengan pencatatan minim** umumnya memiliki arus kas yang tidak stabil, baik karena pasokan bahan baku tidak menentu, volume produksi fluktuatif, maupun pemasaran yang belum terbangun. Pencatatan keuangan hanya dilakukan saat ada kebutuhan administratif, misalnya untuk pelaporan program. Pola ini tidak cukup membentuk disiplin usaha maupun jejak finansial yang kredibel. Ketiadaan catatan dan perencanaan menyebabkan kelompok lebih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal dari anggota, dan mempersempit peluang untuk mengakses pembiayaan formal yang memerlukan bukti historis aktivitas ekonomi.
- Sebaliknya, **kelompok dengan pencatatan rutin** cenderung memiliki siklus pendapatan yang lebih konsisten. Misalnya, kelompok dengan proses produksi yang berkelanjutan, atau kelompok yang aktif menjalin relasi dengan pembeli tetap dan mitra distribusi. Keberlanjutan aktivitas ekonomi ini memungkinkan pencatatan yang lebih terstruktur dan menjadi pondasi penting bagi evaluasi kelayakan kredit serta membuka jalan menuju akses pembiayaan formal.

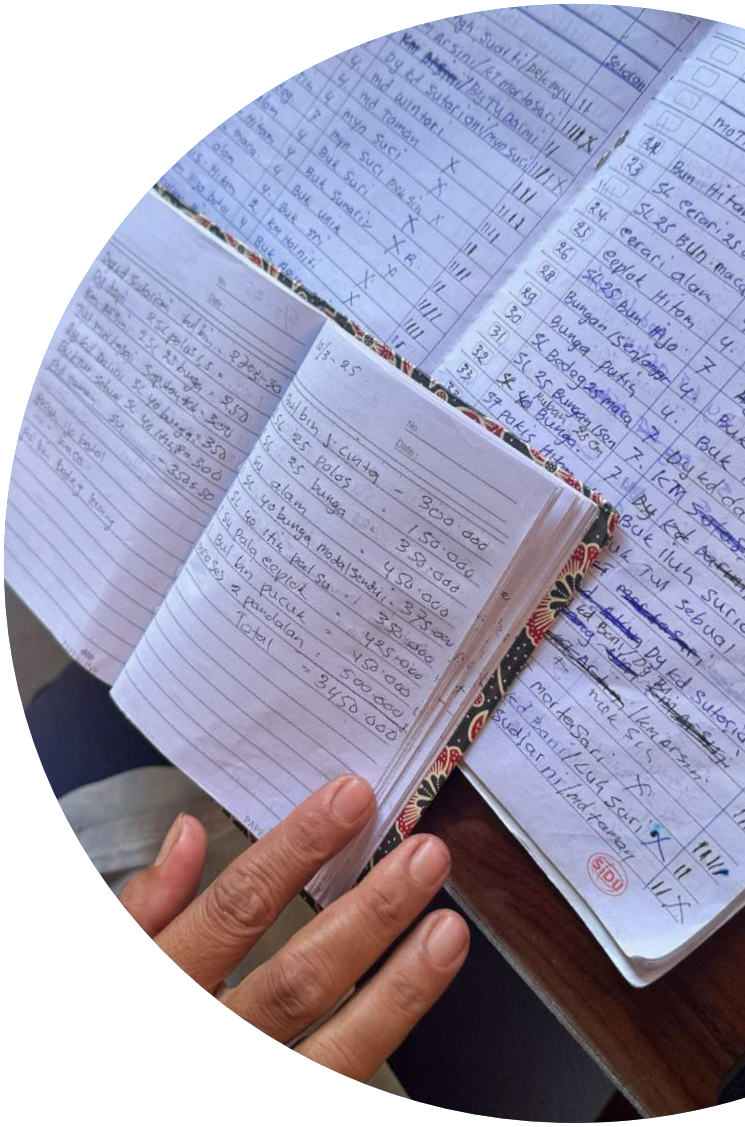

Temuan ini menegaskan bahwa pencatatan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi indikator penting dari stabilitas usaha dan kesiapan kelompok untuk mengakses pembiayaan formal secara berkelanjutan.

Temuan 4

Peran ganda perempuan dalam rumah tangga memengaruhi rendahnya partisipasi, keterlibatan, dan dampak yang dirasakan anggota perempuan dari pelatihan

Mayoritas anggota kelompok menunjukkan minat terhadap pelatihan sebagai sarana untuk mengembangkan kapasitas usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun, manfaat pelatihan belum dirasakan secara merata, terutama oleh perempuan, karena adanya berbagai hambatan yang memengaruhi akses dan partisipasi mereka.

Hambatan-hambatan utama yang dihadapi anggota kelompok untuk mengakses pelatihan dan pengembangan kapasitas antara lain:

- **Informasi pelatihan bersifat *top-down* dan terpusat pada figur sentral.** Informasi pelatihan yang bersifat *top-down* atau disampaikan hanya kepada ketua/pengurus sering kali tidak menjangkau seluruh anggota, memperbesar ketimpangan pemahaman dan akses terhadap informasi penting, khususnya bagi anggota perempuan yang memiliki mobilitas terbatas. Terlebih, kelompok yang sangat bergantung pada ketua atau pemilik usaha cenderung tidak memberi ruang bagi anggota lain untuk ikut pelatihan, terutama jika pelatihan dianggap tidak relevan oleh figur sentral tersebut — baik laki-laki maupun perempuan — yang memiliki prioritas dan kebutuhan berbeda dari sebagian anggota kelompok.
- **Jadwal pelatihan tidak sesuai dengan waktu dan peran ganda perempuan.** Banyak anggota perempuan menanggung peran ganda antara mengurus rumah tangga sekaligus menjalankan usaha mikro. Jadwal pelatihan yang kaku dan tidak mempertimbangkan waktu luang mereka membuat mereka sulit berpartisipasi penuh. Alih-alih mendukung pemberdayaan, pelatihan dengan pendekatan ini justru berisiko memperbesar kesenjangan literasi keterampilan antar anggota kelompok.
- **Kurangnya mekanisme tindak lanjut pasca pelatihan yang memperkuat pembelajaran.** Forum pasca-pelatihan, seperti grup diskusi, sesi pendampingan, atau ruang berbagi pengalaman, masih terbatas dan belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, peserta memiliki sedikit kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan saling bertukar praktik baik. Pengetahuan yang tidak terus diaktifkan berisiko memudar seiring waktu, dan praktik lama pun kembali dilakukan.

> *Setelah pelatihan awal, tidak ada sesi tindak lanjut atau forum untuk berbagi pengalaman, sehingga anggota kembali ke praktik lama.*

- **Insentif pelatihan belum mendorong hasil nyata bagi penghidupan pribadi.** Beberapa anggota merasa bahwa pelatihan tidak memberikan dampak langsung terhadap pendapatan atau kelangsungan usaha mereka. Ketika manfaat pelatihan tidak dikaitkan dengan peluang konkret — seperti akses pasar, kemudahan pembayaran digital, atau insentif moneter/non-moneter lainnya — motivasi untuk terlibat pun rendah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan insentif berbasis hasil (*performance-based learning*) yang mendorong partisipasi lebih luas.

Agar pelatihan efektif dan inklusif, pendekatannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial, kebutuhan usaha, serta dinamika gender yang ada pada anggota kelompok. Temuan kajian ini memperlihatkan bahwa pelatihan yang efektif untuk kelompok usaha dampingan adalah pelatihan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan usaha, dinamika gender, dan kondisi keseharian anggota kelompok. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan yang:

- **Berbasis praktik dan kontekstual,** yaitu berfokus pada keterampilan yang langsung mendukung peningkatan kapasitas produksi atau pemasaran.
- **Fleksibel terhadap waktu dan dinamika gender anggota kelompok.** Perempuan umumnya lebih memilih pelatihan yang dilakukan pada hari kerja, terutama di jam sekolah anak, dan tidak keberatan jika sesi pelatihan dipecah menjadi beberapa hari. Sebaliknya, laki-laki lebih nyaman mengikuti pelatihan di akhir pekan atau hari libur. Perbedaan preferensi ini menunjukkan pentingnya pentingnya jadwal pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan lintas gender serta mengakui beban pengasuhan yang tidak merata.
- **Mengintegrasikan pembelajaran langsung,** seperti kunjungan lapangan ke kelompok usaha/ kelompok binaan lain atau kegiatan *business matching*, agar anggota dapat belajar dari praktik nyata sekaligus memperluas akses ke pasar dan jejaring usaha.

Tabel 4.
Hambatan dan aspirasi anggota terkait pelatihan

Aspek	Hambatan	Aspirasi anggota
Akses informasi pelatihan	Informasi pelatihan bersifat t*op-down* dan terpusat pada figur sentral (pengurus), dan seringkali tidak tersampaikan ke seluruh anggota	**Informasi yang terbuka** dan langsung **menjangkau seluruh anggota**
Waktu dan jadwal pelatihan	Jadwal pelatihan seringkali sudah ditentukan dan tidak mempertimbangkan rutinitas kegiatan anggota (misal perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik)	Pelatihan yang **mempertimbangkan ritme keseharian lintas gender**
Tindak lanjut pelatihan	Kurangnya forum/komunikasi pasca pelatihan yang berkelanjutan yang mengakibatkan pengetahuan cepat hilang	Kebutuhan **forum *follow-up*** pelatihan: diskusi, *mentoring*, praktik lapangan
Insentif (dampak) pelatihan	Pelatihan dirasa tidak memberikan dampak langsung terhadap pendapatan atau kelangsungan usaha anggota	**Pelatihan** yang berbasis **praktik** dan **berdampak langsung**, seperti pemasaran, dikombinasikan dengan eksposur langsung terhadap akses pasar

Selain itu, terdapat perbedaan kebutuhan spesifik pelatihan antara perempuan dan laki-laki lintas gender:

- **Perempuan** cenderung membutuhkan pelatihan dalam format kelompok kecil yang nyaman, difasilitasi oleh pelaku usaha lokal yang sudah dikenal. Dukungan logistik seperti transportasi dianggap penting, sementara penyediaan tempat bermain anak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, karena sebagian besar tetap terbebani oleh tugas pengasuhan selama pelatihan berlangsung.
- **Laki-laki** relatif lebih fleksibel dalam format dan waktu pelatihan, namun lebih termotivasi jika pelatihan difasilitasi oleh tokoh usaha besar yang dianggap sukses dan memiliki reputasi di bidangnya.

Tabel 5.
Perbedaan kebutuhan pelatihan antara perempuan dan laki-laki

Kebutuhan pelatihan	Perempuan	Laki-laki
Topik	**Pelatihan keterampilan** produksi yang sesuai dengan usaha, pengembangan bisnis, dan pemasaran	**Topik yang selaras dengan keterampilan**, dan memberi hasil langsung ke usaha
Waktu	Lebih memilih dilakukan pada **hari kerja**, khususnya **di jam sekolah anak**	Lebih nyaman mengikuti pelatihan **di akhir pekan** atau **hari libur**, namun **cenderung lebih fleksibel**
Format	**Kelompok kecil** dengan suasana nyaman	**Fleksibel**, selama **forum** dapat memberi **ruang** yang cukup untuk **bertanya**
Metode	**Berbasis praktik** dan disertai **kunjungan lapangan**	**Berbasis praktik dan interaktif** (disertai dengan tanya jawab yang terbuka)
Fasilitator	**Sesama pelaku usaha kecil** atau fasilitator yang dikenal	**Tokoh usaha** besar yang dianggap **sukses**
Dukungan	**Transportasi** dianggap penting; sedangkan tempat bermain anak kurang efektif karena tetap ada beban pengasuhan saat pelatihan berlangsung	Dukungan **transportasi** dianggap penting; tidak memerlukan pengasuhan anak karena ada keluarga yang membantu

Rekomendasi

Rekomendasi dalam laporan ini disusun melalui analisis terstruktur yang memetakan temuan kunci riset ini yaitu aspek yang berkaitan dengan norma gender, inisiasi, pelatihan/ pendampingan, dan keuangan lalu memetakannya pada tahap pelaksanaan (Persiapan, Implementasi, atau *Monitoring* dan Evaluasi) sesuai relevansi strategis dan dampaknya (lihat Lampiran 2).

Pendekatan ini memberikan peta jalan yang jelas bagi Bank Indonesia untuk merancang intervensi berbasis bukti, memprioritaskan langkah yang memiliki dampak terbesar, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, strategi yang diambil tidak hanya menutup kesenjangan dalam inklusi keuangan, tetapi juga secara langsung mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap konteks lokal.

Tahap persiapan

Fokus utama rekomendasi pada tahap ini adalah membangun pondasi program yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan narasi program, integrasi materi kesetaraan gender dalam pelatihan, mekanisme seleksi berbasis kriteria yang tepat, pelibatan pemangku kepentingan sejak awal program, serta penyusunan pedoman operasional yang sederhana namun efektif.

- ***Branding* program yang inklusif dengan memunculkan perempuan dan laki-laki sebagai aktor ekonomi yang setara, serta menekankan prinsip "kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat" sebagai landasan narasi program.** Program pengembangan EKI berbasis kelompok subsisten sebaiknya membangun citra bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kemampuan yang setara dalam mendorong perekonomian lokal. *Branding* ini dapat diwujudkan melalui berbagai media komunikasi seperti buku pedoman, poster, modul pelatihan, kanal media sosial, dan pada kegiatan publik seperti pameran produk.

  Sebagai contoh, program pelatihan atau pemberdayaan dapat menampilkan kisah inspiratif dari perwakilan anggota kelompok perempuan dan laki-laki yang menunjukkan bagaimana kolaborasi setara di dalam kelompok mampu meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, atau memperkuat posisi mereka dalam rumah tangga dan komunitas.

Misalnya, kisah seorang ibu rumah tangga yang awalnya tidak memiliki penghasilan, kemudian bergabung ke dalam kelompok subsisten. Dengan dukungan suaminya, ibu anggota kelompok tersebut menjadi lebih berdaya, mampu mengambil keputusan keuangan secara mandiri, dan kontribusinya semakin diakui oleh keluarga dan komunitas sekitar. Narasi cerita inspiratif ini sebaiknya menggunakan bahasa yang positif, misalnya "perempuan berdaya, ekonomi tumbuh", sehingga menonjolkan peran penting perempuan, tanpa mengecilkan kontribusi laki-laki, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun ekonomi rumah tangga. Karena itu, penting untuk menghindari stereotip gender dalam menampilkan kisah sukses. Dengan begitu, narasi baru ini benar-benar menempatkan perempuan tidak hanya sebagai pendukung domestik, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

- **Integrasi materi kesetaraan gender dalam beberapa pelatihan.** Bank Indonesia dapat mengintegrasikan materi kesetaraan gender ke dalam pelatihan untuk Kantor Perwakilan, yang kemudian diteruskan oleh Kantor Perwakilan ke dalam pelatihan bagi para pendamping di lapangan. Materi ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, termasuk kemampuan mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) dan identifikasi diskriminasi gender (stereotip, subordinasi, marjinalisasi, peran ganda dan kekerasan) yang dapat muncul selama pelaksanaan program.

Contoh materi kesetaraan gender yang dapat diadopsi

- Konsep dasar kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan ekonomi dan keuangan inklusif.
- Analisis gender sederhana (misalnya kerangka APKM) untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kelompok subsisten.
- Teknik pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan disabilitas.
- Strategi menciptakan lingkungan pelatihan yang inklusif gender (misalnya pengaturan waktu yang ramah perempuan, pelibatan dan dukungan pasangan/keluarga, pembagian pekerjaan domestik).
- Studi kasus atau cerita inspiratif keberhasilan program yang responsif gender sebagai pembelajaran praktik baik.
- Cara merancang dan memantau intervensi agar berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan manfaat bagi perempuan.

- **Seleksi kelompok melalui asesmen yang tepat sasaran.** Dalam pedoman pengembangan EKI kelompok subsisten, asesmen kondisi awal kelompok sasaran dilakukan melalui mekanisme survei atau wawancara dengan mengacu pada aspek kondisi keuangan inklusif, pengembangan usaha, dan kelembagaan. Temuan lapangan merekomendasikan tambahan asesmen yang lebih komprehensif sehingga ketika pembentukan kelompok dibuat dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, asesmen awal ini juga akan menjadi data dasar yang dapat dibandingkan dengan penilaian akhir untuk menilai keberhasilan program. Hal ini meliputi:

  - **Pemetaan usaha dan potensi** untuk mengidentifikasi profil usaha kelompok, termasuk model usaha, kesesuaian dengan kearifan lokal, dan peluang pengembangan di masa depan.

    Pola pembentukan kelompok dan model usaha kelompok memengaruhi cara anggota merespons keputusan, menjalankan peran, dan membangun komitmen jangka panjang. Selain itu, bias sektoral dapat mengeksklusi individu dengan gender tertentu untuk bergabung dalam kelompok usaha pada sektor yang bernilai tinggi yang dapat berakibat memperluas kesenjangan gender. Oleh sebab itu, perlu memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam kelompok usaha yang menjadi sasaran program.

    Kajian ini merekomendasikan agar inisiator sejak tahap persiapan dapat mengidentifikasi model bisnis kelompok subsisten yang didampingi, apakah kolektif organik, kolektif programatik, kemitraan organik, atau kemitraan programatik [Gambar 4]. Inisiator juga dapat menambah atau memodifikasi pengelompokkan yang ada sesuai dengan pola pembentukan atau model usaha yang ditemukan di lapangan. Namun, empat kategori kelompok yang telah ada dapat dijadikan referensi awal untuk memetakan kelompok, agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan secara tepat dengan karakteristik masing-masing model. Identifikasi model bisnis ini juga sebaiknya memperhatikan potensi *glass ceiling* yang dapat membatasi perempuan kendati mereka memiliki kapasitas dan motivasi.

  - **Analisa kesiapan dan dukungan** dengan menilai komitmen, motivasi, dan kesiapan kelompok; memastikan struktur kepengurusan yang seimbang secara gender; serta menilai kesiapan anggota dan keluarganya untuk terlibat secara aktif dalam kelompok. Analisa kondisi rumah tangga untuk memahami sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dan mendapatkan dukungan dari lingkungannya dapat membantu menentukan strategi intervensi yang tepat, termasuk strategi pelibatan pasangan/suami sejak awal program untuk memperkuat dukungan terhadap peran perempuan. Pendekatan ini dapat memitigasi risiko peran ganda serta memperkuat relasi kuasa yang lebih setara dalam rumah tangga.

Contoh kondisi rumah tangga dan intervensi desain program

Persona:
Erna
Social go-getter

Contoh kondisi rumah tangga:
Perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri, tidak memiliki rekening pribadi, dan seluruh keputusan harus melalui persetujuan suami.

Potensi intervensi:
Melibatkan suami sejak awal dalam proses sesi sosialisasi, agar memahami manfaat ekonomi apabila istrinya mengikuti program, serta mendorong kesepakatan bersama dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Selain itu, memfasilitasi pembukaan rekening atas nama pribadi melalui kemitraan dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Persona:
Rini
Flexible-hustler/ steady mom-preneur

Contoh kondisi rumah tangga:
Perempuan memiliki usaha sendiri yang dikelola bersama dengan suami, namun prioritas utamanya masih untuk kebutuhan rumah tangga. Keuangan usaha dan rumah tangga dikelola bersama dengan suami, dan keputusan harian sebagian besar dipegang oleh perempuan.

Potensi intervensi:
Melibatkan suami dalam pelatihan dan sesi pendampingan agar keduanya memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Mendorong pencatatan keuangan sederhana agar perempuan dapat mengelola penghasilan pribadinya secara mandiri.

Persona:
Rosi
Visioner mom-preneur, consistent grower

Contoh kondisi rumah tangga:
Perempuan mendapatkan dukungan penuh dari suami dan keluarga dalam menjalankan usahanya.

Potensi intervensi:
Menjadikan pasangan mereka sebagai *role model* untuk membagikan pengalaman positifnya dalam forum atau kegiatan publik, sehingga dapat menginspirasi rumah tangga lain agar dapat lebih mendukung perempuan.

- **Analisis kondisi sosial-ekonomi** yang mempertimbangkan latar belakang ekonomi rumah tangga untuk memahami kontribusi ekonomi anggota, khususnya perempuan, dalam rumah tangga, termasuk sumber dan besaran pendapatan yang dihasilkan, sejauh mana pendapatan tersebut memengaruhi keputusan keuangan keluarga, serta peran perempuan dalam menopang kebutuhan rumah tangga. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang intervensi dan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan kapasitas ekonomi awal dan potensi penguatan peran ekonomi perempuan. Selain itu, indikator ini juga dapat menjadi alat deteksi marjinalisasi ekonomi yang dialami perempuan.

Rekomendasi perubahan pada beberapa pertanyaan survey awal dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Rekomendasi perubahan instrumen survei awal

Aspek	Temuan	Rekomendasi perubahan
Profil individu (kondisi ekonomi, pendapatan)	**Data pendapatan masih** dicatat secara **agregat** (keluarga/kelompok), belum dipisah per individu. Penting untuk mengetahui data pendapatan per individu untuk melihat perubahan yang dialami masing-masing anggota.	**Menambahkan pertanyaan:** • "Berapa rata-rata pendapatan individu Anda per bulan (Rp)?"
Profil individu (kondisi ekonomi, kontribusi terhadap pendapatan keluarga)	**Data belum mencatat kontribusi individu terhadap pendapatan rumah tangga**. Informasi ini penting untuk menilai peran ekonomi masing-masing anggota.	**Menambahkan pertanyaan:** • "Berapa pendapatan Bapak?" • "Berapa pendapatan Ibu?" Dengan ditanyakan dua pertanyaan ini, Bank Indonesia dapat menganalisa persentase kontribusi pendapatan suami dan istri dalam rumah tangga.
Kegiatan ekonomi (dukungan keluarga/ pasangan)	Banyak **perempuan menghadapi tantangan** mengikuti pelatihan atau mengelola **usaha karena norma sosial terkait tanggung jawab domestik**. Informasi tentang dukungan pasangan/ keluarga penting untuk mendesain intervensi yang tepat.	**Menambahkan pertanyaan:** • "Apakah Anda mendapat dukungan dari pasangan atau keluarga dalam menjalankan usaha?" • "Tantangan apa yang Anda hadapi dalam menjalankan usaha?"
Pemetaan kondisi keuangan (pengetahuan tentang produk dan lembaga keuangan, rekening formal atas nama pribadi)	Banyak anggota kelompok mengaku memiliki **tabungan**, tetapi **menggunakan rekening atas nama orang lain** (misalnya pasangan), sehingga kontrol keuangan terbatas.	Setelah pertanyaan "Apakah saat ini Anda memiliki rekening di lembaga keuangan", **Menambahkan pertanyaan lanjutan:** • "Jika ya, apakah produk keuangan tersebut atas nama Anda pribadi atau orang lain?"
Pemetaan kondisi kelembagaan (model usaha)	Beberapa model usaha **tidak transparan** dalam **menyampaikan informasi keuangan kelompok maupun kesempatan pelatihan**.	**Menambahkan pertanyaan:** • "Bagaimana mekanisme distribusi pendapatan dalam kelompok?" • "Bagaimana proses pengambilan keputusan di kelompok?"

- **Identifikasi *local leader*** sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mendorong peran mereka sebagai penggerak utama pendampingan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui pemetaan menggunakan pendekatan persona, yaitu dengan memetakan karakteristik, motivasi, dan perilaku anggota kelompok untuk mengenali siapa yang memiliki potensi memimpin atau mendampingi anggota lainnya. Lima persona yang telah ada dalam kajian ini dapat dijadikan referensi awal untuk memetakan kecenderungan karakter anggota kelompok dan mengidentifikasi siapa yang paling potensial menjadi *local leader*.

  Meskipun pemilik usaha kerap memiliki kapasitas besar untuk mengambil peran *local leader*, pemisahan peran antara *local leader,* pendamping, dan pemilik usaha/ketua kelompok tetap disarankan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi bias, serta memastikan keberlanjutan pendampingan yang lebih objektif dan inklusif. Pada tahap ini, penting untuk menghindari reproduksi stereotip gender, seperti anggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin.

- **Desain program berdasarkan pemetaan hasil asesmen anggota melalui pendekatan persona.** Setelah data anggota kelompok terkumpul, Kantor Perwakilan dan pendamping dapat menyesuaikan desain program pengembangan EKI kelompok subsisten berdasarkan pemetaan persona. Persona tidak terbatas pada lima contoh yang telah dibuat dalam penelitian ini. Fasilitator dapat mengembangkan persona baru atau memodifikasi yang ada sesuai dengan konteks dan dinamika kelompok yang mereka dampingi. Namun, lima persona yang telah ada dapat dijadikan referensi awal untuk memetakan kecenderungan karakter anggota kelompok, agar intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, baik dalam hal desain pelatihan, materi/kurikulum pelatihan, pengelolaan keuangan, pendampingan, maupun dukungan usaha. Selain itu, riset lembaga lain, seperti Amartha[14], juga dapat digunakan sebagai referensi untuk mengenali karakteristik masyarakat subsisten, tantangan, dan kebutuhan mereka terhadap akses dan layanan keuangan, seperti pembiayaan.

Tabel 7.
Contoh desain program berdasarkan persona

Contoh persona	Metode/desain pelatihan	Contoh materi pelatihan	Pendampingan keuangan usaha
Erna ***Social go-getter***	Pelatihan yang diintegrasikan dengan kegiatan sosial lainnya (PKK, KWT, Posyandu)	Pencatatan keuangan dasar dengan metode sederhana	Pembukaan rekening langsung oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan
Rini ***Flexible hustler/ steady mom-preneur***	Pelatihan modular fleksibel (waktu pendek) yang berbasis praktik lapangan	Pemasaran dasar	Pendampingan rencana pengembangan usaha bertahap
Rosi ***Visioner mom-preneurs, consistent growers***	Pelatihan intensif terstruktur yang disesuaikan dengan jadwal keluarga	Penggunaan *digital marketing* untuk pemasaran	Akses ke kredit, mentoring pengembangan usaha

14 Riset 'Amartha Grassroot Entepreneurs' mengelompokkan pelaku usaha ultra-mikro ke dalam empat persona: *advanced pioneers*, *emerging innovators*, *emerging challengers*, dan *novice risky borrowers* untuk memetakan tingkat inovasi dan akses pembiayaan usaha mereka. Segmentasi persona ini didasarkan pada tiga kriteria utama: modal, pendapatan, dan keinginan untuk belajar.

- **Pelibatan aktif Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sejak awal pembentukan kelompok secara terukur.** Bank Indonesia sudah memasukkan pemetaan *stakeholder* dalam tahapan persiapan. Untuk memastikan komitmen dari setiap *stakeholder* yang lebih berdampak, Bank Indonesia dapat mendorong pelibatan PUSK, baik bank maupun non-bank, sejak awal program untuk mendorong akses dan penggunaan layanan keuangan oleh kelompok usaha dan anggotanya. Jika dimungkinkan, PUSK dapat diberikan target konkret berbasis gender, seperti jumlah pembukaan rekening baru, pembuatan atau penerapan QRIS, atau penyaluran kredit/pembiayaan, sehingga peran LJK lebih terstruktur dan memberi dampak nyata. Selain target kuantitatif, PUSK juga dapat didorong untuk mendesain produk dan layanan yang sensitif gender.

  Pada tahap persiapan, panduan dapat menetapkan target minimal yang juga mencakup sasaran khusus untuk perempuan (misalnya: 80% anggota kelompok membuka rekening formal selama pelatihan pertama, dan minimal 50% di antaranya melakukan satu transaksi digital dalam bulan yang sama). Dengan cara ini, pelatihan benar-benar menjadi jembatan untuk meningkatkan akses sekaligus penggunaan aktif layanan keuangan, khususnya untuk anggota perempuan.

- **Penyederhanaan pedoman** yang difokuskan pada poin-poin yang berdampak secara langsung dan penambahan panduan operasional terkait:
  - Pelaksanaan pertemuan rutin anggota kelompok yang disertai dengan jadwal yang terstruktur, terdokumentasi, dan menggunakan format pencatatan baku sejak awal.
  - Strategi atau panduan untuk memastikan seluruh anggota aktif dalam pelatihan, termasuk penggunaan metode yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan kelompok.

Tahap implementasi

Rekomendasi laporan ini menekankan bahwa pada tahap implementasi, penguatan kapasitas kelompok harus beriringan dengan penguatan individu dan kelembagaan, juga dinamika masing-masing kelompok. Penguatan harus difokuskan tidak hanya pada formalisasi kelompok, tapi juga pada peningkatan keterampilan usaha, literasi keuangan, dan dukungan sosial bagi anggota, terutama perempuan, dan mekanisme kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan pendekatan ini, hasil pendampingan diharapkan akan lebih berkelanjutan karena didasari dengan kelembagaan kelompok yang partisipatif, transparan dan responsif gender.

Penguatan kelembagaan

Temuan penelitian menekankan pentingnya tata kelola kelompok yang lebih responsif gender untuk memastikan setiap anggota memiliki kesempatan yang setara dalam usaha maupun dalam proses pengambilan keputusan.

- **Representasi perempuan dan laki-laki yang seimbang dalam pengambilan keputusan.** Meskipun pedoman saat ini telah memberikan panduan tentang pembagian peran dan tanggung jawab, praktik di lapangan menunjukkan perempuan seringkali kurang terwakili dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kelompok perlu menyepakati prosedur yang memastikan representasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan strategis. Untuk memastikan representasi yang bermakna dan bukan sekadar kuota, perlu dilakukan rotasi pembagian peran baik dalam forum (moderator, notulen) maupun dalam struktur kelembagaan. Pelatihan kepemimpinan responsif gender juga penting diberikan kepada pengurus dan calon pemimpin, agar mereka memahami bagaimana membangun kepemimpinan dan kelembagaan yang inklusif.

- **Ritme kerja dan aturan kelompok yang fleksibel.** Agar perempuan dapat tetap produktif tanpa terbebani pekerjaan domestik, kelompok perlu memiliki aturan dan ritme kerja yang fleksibel. Misalnya, penjadwalan pertemuan yang mempertimbangkan waktu rumah tangga, pembagian tugas yang bergilir, atau mekanisme dukungan antaranggota. Panduan operasional dapat disusun untuk memformalkan fleksibilitas ini, sehingga kebutuhan perempuan diakomodasi tanpa mengurangi efektivitas kelompok.

- **Pelibatan keluarga atau kerabat untuk mendukung keterlibatan perempuan.** Dukungan sosial sangat menentukan partisipasi perempuan. Karena itu, pasangan atau kerabat yang tinggal serumah perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kegiatan, sehingga ada pemahaman bersama tentang pentingnya keikutsertaan perempuan dalam kelompok dan bentuk dukungan seperti apa yang diharapkan dapat diberikan keluarga. Kegiatan internalisasi bersama keluarga dapat dijadikan agenda rutin agar dukungan tidak bersifat sementara.

- ***Monitoring* sederhana untuk mendorong partisipasi aktif seluruh anggota.** Kehadiran dan keterlibatan anggota tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban formal, melainkan bagian dari budaya kelompok. Mekanisme sederhana berupa *logbook* kehadiran, pesan pengingat, atau insentif bagi anggota yang konsisten terlibat aktif dapat menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih bermakna.

Penguatan kapasitas untuk pengembangan usaha

- ***Peer learning* sebagai penguat pelatihan teknis.** Pelatihan rutin yang difasilitasi kelompok sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme pembelajaran sejawat *(peer learning)*. Proses ini bisa dilakukan baik antar anggota dalam satu kelompok maupun antar kelompok melalui forum bersama. Dengan cara ini, anggota dapat saling berbagi pengalaman dan keterampilan secara bergiliran, yang dapat didukung dengan panduan sederhana agar setiap orang merasa percaya diri. Insentif, seperti kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan, kesempatan mendapatkan peluang kredit, atau peran sebagai fasilitator di kelompok lain, dapat menumbuhkan motivasi anggota. Agar tepat guna, format, topik, dan jadwal sesi berbagi perlu disepakati secara kolektif sesuai kebutuhan semua pihak. Topik kesetaraan gender juga penting untuk diintegrasikan di dalam *peer learning*, untuk mendorong ruang diskusi dan kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki.

- **Desain pelatihan yang melibatkan anggota.** Materi pelatihan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh pengurus, tetapi disusun melalui musyawarah anggota dan pengurus agar lebih sesuai dengan profil usaha dan kebutuhan keterampilan para anggota. Dengan pendekatan ini, perempuan dan laki-laki dapat menyuarakan prioritasnya masing-masing, sehingga konten pelatihan lebih relevan dan inklusif. Setiap modul pelatihan juga sebaiknya menyertakan studi kasus nyata anggota kelompok, untuk memperkuat kontekstualitas pelatihan.

- **Dukungan pembelajaran berbasis digital yang bertahap dan adaptif.** Kelompok dapat membentuk kanal komunikasi digital sederhana — misalnya WhatsApp Group — untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran, saling berbagi materi, mendiskusikan tantangan usaha. Kanal ini bisa digunakan antar anggota dalam satu kelompok maupun antar kelompok untuk memperluas pertukaran pengalaman, dan memperluas akses pasar. Selain memperkuat solidaritas di luar pertemuan tatap muka, kelompok juga dapat mengadakan pembaruan keterampilan digital secara berkala, dengan fokus pada teknologi yang relevan dengan usaha anggota, sehingga kapasitas tetap sejalan dengan perkembangan pasar. Apabila dimungkinkan, pelatihan literasi digital juga dapat diperluas kepada anggota keluarga (anak/remaja) untuk membangun ekosistem pendukung yang lebih kuat.

- **Kemitraan strategis dengan sekolah vokasi dan pemangku kepentingan lain.** Kolaborasi dengan sekolah vokasi membuka akses pada pengembangan kapasitas melalui tenaga magang yang membawa perspektif segar dalam pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk. Kehadiran tenaga magang tidak hanya membantu operasional sehari-hari, tetapi juga mendorong inovasi usaha sehingga kelompok lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Sementara itu, bagi sekolah vokasi, kemitraan ini menyediakan ruang praktik lapangan bagi siswa sekaligus menjadi sarana untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata di tingkat usaha lokal. Desain kolaborasi juga perlu dibuat adaptif agar dapat terintegrasi lintas program. Program kelompok subsisten — sebagai salah satu dari banyak program strategis KPwDN — perlu dihubungkan dengan inisiatif lain yang relevan, seperti digitalisasi usaha, ketahanan pangan, atau pengembangan kewirausahaan. Kelompok subsisten yang sudah mapan dapat berperan sebagai mentor, atau sebaliknya memperoleh pendampingan dari kelompok lain di bawah payung program KPwDN. Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok memperoleh manfaat berlapis, saling menguatkan, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan program secara lebih komprehensif.

Penguatan literasi keuangan dan fasilitasi akses keuangan

- **Integrasi pelatihan dengan akses ke layanan keuangan secara nyata.** Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok subsisten umumnya masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan keuangan dan pemanfaatan kanal digital masih terbatas. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan *hybrid* yang mengombinasikan metode fisik/manual dan digital dapat diterapkan sebagai strategi transisi yang lebih bertahap dan inklusif. Misalnya, dalam pencatatan keuangan berbasis digital, keterbatasan infrastruktur seperti kepemilikan ponsel pintar dan akses internet di daerah terpencil dapat diatasi dengan menerapkan pencatatan manual terlebih dahulu, yang kemudian didigitalisasi secara berkala oleh pendamping atau anggota yang memiliki kapasitas digital lebih baik.

  Selain itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi di tingkat kelompok tidak serta merta meningkatkan literasi keuangan digital di tingkat individu dan sebagian besar anggota masih belum nyaman menggunakan teknologi keuangan digital. Oleh karena itu, pelatihan sebaiknya melibatkan PUSK secara langsung, dengan menggabungkan materi keterampilan bisnis dengan akses langsung pada produk keuangan. Hal ini memungkinkan anggota kelompok langsung mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Untuk memperkuat keberlanjutan, PUSK dapat didorong untuk melakukan kunjungan berkala atau pelayanan khusus kelompok subsisten.

- **Penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan keuangan yang dapat diakses oleh anggota.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan untuk usaha pribadi, sementara pencatatan usaha kelompok masih terpusat pada ketua/bendahara dan kurang transparan. Untuk itu, pedoman perlu mewajibkan setiap kelompok melakukan pencatatan keuangan, termasuk pengeluaran, dengan mendorong penggunaan aplikasi atau fitur pencatatan sederhana yang dapat diakses oleh anggota. *Local leader* dapat berperan aktif dalam memotivasi anggota untuk mengadopsi pencatatan digital. Selain itu, pedoman juga perlu ditambahkan dengan panduan transparansi distribusi omzet kelompok kepada seluruh anggota, guna memastikan akuntabilitas dalam kelompok. Transparansi ini dapat diperkuat dengan mendorong publikasi laporan keuangan berkala ke seluruh anggota, baik cetak maupun digital.

Contoh praktis integrasi pelatihan dengan layanan keuangan

Pembukaan rekening dan simulasi transaksi

Setelah sesi literasi mengenai manfaat menabung dan pentingnya pencatatan usaha, fasilitator mengundang perwakilan bank atau agen bank untuk mendampingi anggota secara bertahap untuk membuka rekening tabungan pribadi yang sederhana. Kehadiran agen bank penting, terutama di wilayah perdesaan, karena memudahkan akses anggota kelompok terhadap layanan dasar seperti pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga produk keuangan mikro sederhana.

Dengan begitu, anggota memperoleh akses ke rekening atas nama mereka masing-masing pada saat pelatihan. Tahap berikutnya, peserta diajak langsung mencoba menggunakan rekening tersebut, misalnya melakukan setoran awal hasil usaha ke rekening pribadi atau melakukan transaksi QRIS sederhana. Dengan demikian, anggota tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga mulai menggunakannya secara aktif untuk mengelola keuangan usaha maupun pribadi.

Pencatatan keuangan dengan aplikasi sederhana

Anggota diperkenalkan pada aplikasi pencatatan sederhana untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan arus kas usaha. Pendamping atau *local leader* dapat memberikan panduan praktis sekaligus memotivasi anggota agar pencatatan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Pembayaran digital untuk kebutuhan kelompok dan distribusi omzet

Peserta didorong mencoba kanal pembayaran digital, baik melalui e-wallet maupun QRIS, untuk berbagai kebutuhan kelompok. Contoh yang dapat diterapkan adalah pembayaran iuran kelompok secara non-tunai. Selain itu, omzet/laba usaha kelompok sebaiknya hanya didistribusikan melalui rekening masing-masing anggota, bukan secara tunai, untuk mendorong transparansi, keamanan, sekaligus membiasakan penggunaan layanan keuangan formal dalam pengelolaan usaha.

Tahap *monitoring* dan evaluasi

Untuk memastikan pengukuran hasil program lebih akurat, komprehensif, dan bermanfaat bagi perbaikan kebijakan, pedoman program pengembangan EKI berbasis kelompok subsisten saat ini sudah menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program dari tiga dimensi utama: pengelolaan keuangan (pribadi dan usaha), pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan. Proses *monitoring* program juga sudah dilakukan secara rutin melalui mekanisme laporan rutin dan *site visit*, sedangkan asesmen akhir dilakukan melalui survei kepada kelompok sasaran.

Penelitian ini merekomendasikan agar sistem *monitoring* diperkuat dengan pendekatan yang lebih responsif gender, antara lain dengan mengintegrasikan indikator dan analisis gender ke dalam laporan rutin, sehingga perkembangan dan tantangan perempuan dan laki-laki anggota kelompok dapat terpantau secara lebih akurat dan digunakan untuk perbaikan kebijakan serta desain program selanjutnya. Selain itu, kuesioner survei juga disarankan menggunakan seperangkat pertanyaan yang sama pada awal dan akhir program untuk memudahkan pemantauan perubahan perilaku, kapasitas, dan hasil yang dicapai oleh anggota kelompok secara lebih terukur.

Penguatan laporan rutin pendampingan sehingga lebih responsif gender

Berdasarkan pedoman yang ada saat ini, selama ini pendamping telah secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program sebagai bagian proses *monitoring* dan evaluasi. Laporan ini disusun berdasarkan pertemuan rutin pendamping dengan kelompok sasaran untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi oleh anggota maupun kelompok, mencakup pelatihan, pengembangan usaha, pengelolaan keuangan, serta penguatan kelembagaan.

Untuk mendorong agar program EKI berbasis kelompok subsisten lebih responsif gender, kajian ini merekomendasikan agar laporan rutin yang sudah berjalan diperkuat dengan satu bagian khusus yang menilai capaian, tantangan dan tindak lanjut yang dilakukan terkait dengan program yang lebih responsif gender.

Contoh struktur laporan rutin bagian analisis gender

- Profil anggota kelompok subsisten terpilah gender (jumlah, usia, jenis kelamin, status perkawinan).
- Analisa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) **sebelum** dan **setelah** pendampingan terkait:
  - Dukungan anggota: pembagian kerja domestik, dukungan pasangan/keluarga terhadap keterlibatan anggota, keterlibatan pasangan/keluarga dalam pengembangan usaha/program pendampingan.
  - Dinamika kelompok: komposisi kepengurusan (perempuan dan laki-laki), keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan identifikasi potensi adanya *glass ceiling* yang membatasi perempuan di posisi strategis.
  - Pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga anggota, antara lain: kepemilikan rekening atas nama pribadi, kontrol terhadap penggunaan hasil usaha/pendapatan, keterlibatan anggota dalam pengelolaan dan keputusan keuangan keluarga, pengakuan terhadap kontribusi ekonomi anggota.
- Strategi dan pendekatan responsif gender yang dilakukan oleh pendamping, antara lain:
  - Metode yang digunakan pendamping untuk mendorong partisipasi yang setara (misalnya: penjadwalan kegiatan yang ramah waktu perempuan, pelibatan pasangan dalam program)
  - Upaya mengidentifikasi dan mengatasi hambatan spesifik gender yang dihadapi anggota perempuan dan laki-laki
  - Kolaborasi dengan pihak lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesetaraan gender
- Refleksi atas strategi yang dijalankan serta rencana perbaikan ke depan dengan memastikan suara perempuan terdengar setara dalam forum evaluasi partisipatif.

Asesmen akhir

Temuan penelitian ini merekomendasikan penguatan pada beberapa indikator survei yang sudah ada, dengan tujuan memastikan lebih inklusif dan mencerminkan manfaat bagi seluruh kelompok sasaran. Penguatan tersebut meliputi beberapa hal berikut ini.

Dimensi pengelolaan keuangan (pribadi dan usaha)

- **Penambahan keterangan "atas nama sendiri" untuk kepemilikan produk keuangan formal anggota kelompok.** Temuan riset memperlihatkan bahwa meskipun ada kepemilikan rekening pribadi, sebagian besar penggunaannya pasif, dan sebagian anggota masih bergantung pada rekening pasangan atau kelompok. Memisahkan kepemilikan pribadi akan membantu mengukur tingkat kemandirian finansial yang sesungguhnya, mengidentifikasi anggota yang belum memiliki kendali penuh atas akses keuangan formal, sekaligus mengungkap subordinasi finansial perempuan dalam rumah tangga.
- **Pengukuran pendapatan individu anggota kelompok per periode pengukuran.** Mengukur pendapatan pribadi membantu membedakan capaian ekonomi tiap anggota dari capaian kelompok, sekaligus memberi gambaran lebih jelas tentang sejauh mana anggota dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha. Jika pendapatan individu masih terbatas, anggota cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan terlibat penuh dalam kegiatan kelompok. Data ini juga penting untuk melihat hubungan antara peningkatan pendapatan individu dan penggunaan layanan keuangan yang lebih luas — misalnya, apakah tambahan pendapatan mendorong anggota membuka rekening atas nama sendiri, memanfaatkan layanan kredit produktif, atau mulai menggunakan pembayaran digital untuk mendukung usahanya.

- **Pengukuran persentase kontribusi anggota terhadap pendapatan keluarga.** Mengetahui kontribusi pendapatan anggota terhadap ekonomi rumah tangga membantu melihat apakah program benar-benar meningkatkan posisi tawar finansial — terutama bagi perempuan. Hal ini penting karena sebagian anggota masih memakai rekening atas nama pasangan, menandakan kendali finansial yang terbatas. Data ini juga membantu mengenali perbedaan profil anggota, siapa saja yang terhambat beban kerja dan finansial rumah tangga. Dengan informasi tersebut, program bisa menargetkan pelatihan dan pendampingan khusus bagi anggota dengan kontribusi rendah agar peran mereka dalam ekonomi rumah tangga meningkat.

- **Transparansi keuangan kelompok.** Salah satu temuan kunci dalam penelitian menemukan adanya model usaha kelompok yang kurang transparan dalam menyampaikan informasi terkait keuangan maupun distribusi pendapatan terhadap anggotanya. Pada tahap persiapan, telah direkomendasikan untuk memetakan bagaimana mekanisme distribusi pendapatan berjalan, siapa yang terlibat dalam pencatatan, serta sejauh mana anggota mendapatkan akses pada laporan keuangan. Pada tahap *monitoring*, informasi ini perlu dipantau untuk melihat konsistensi praktik transparansi.

Tabel 8.
Ringkasan penguatan pengukuran dimensi pengelolaan keuangan

Cakupan indikator	Usulan asesmen awal (*baseline*)	Usulan *monitoring* & evaluasi	Metode pengumpulan	Integrasi ke tabel survei
Kepemilikan produk keuangan formal/ pribadi	Setelah pertanyaan 'Apakah saat ini Anda memiliki rekening di lembaga keuangan', **Menambahkan pertanyaan lanjutan:** • "Jika ya, apakah produk keuangan tersebut atas nama Anda pribadi atau orang lain?"	Jumlah anggota dengan rekening atas nama pribadi dibanding *baseline*	Survei kuantitatif	**Tambahan kolom:** Rekening/tabungan/ pinjaman atas nama sendiri (Ya/Tidak)
Pendapatan individu	• "Berapa rata-rata pendapatan individu Anda per bulan (Rp)?"	Perubahan pendapatan individu dibanding *baseline*	Survei kuantitatif	Kolom pendapatan individu (Rp/bulan) per anggota
Persentase kontribusi ke pendapatan keluarga	**Menambahkan pertanyaan:** • "Berapa pendapatan Bapak?" • "Berapa pendapatan Ibu?"	Perubahan kontribusi pendapatan anggota dibandingkan dengan *baseline*	Survei kuantitatif	Kolom % kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga
Transparansi keuangan kelompok	• "Bagaimana mekanisme distribusi pendapatan dalam kelompok?" • "Bagaimana proses pengambilan keputusan di kelompok?"	**Pantau konsistensi transparansi:** Laporan keuangan dibagikan rutin, semua anggota dapat akses informasi	Survei kuantitatif/ *site visit*	Apakah laporan keuangan rutin dibagikan? (Ya/Tidak)

Dimensi pengembangan usaha

- **Pelaksanaan survei cepat (*pulse survey*) pasca pelatihan/pendampingan.** Untuk memastikan materi pelatihan benar-benar dipahami dan diaplikasikan oleh anggota, program perlu menambahkan mekanisme evaluasi cepat 1–2 minggu setelah pelatihan. Survei singkat ini bertujuan menangkap respon awal, tantangan implementasi, dan kebutuhan dukungan lanjutan sebelum momentum pembelajaran hilang.

Contoh praktis pulse survei pasca pelatihan/pendampingan

- Dapat menggunakan formulir sederhana berisi 3–5 pertanyaan inti, dapat dilakukan secara *online* (WhatsApp, Google Form) atau *offline* melalui fasilitator lapangan.
- Pertanyaan pelatihan fokus pada: (1) materi apa yang sudah diterapkan, (2) hasil yang dirasakan (misalnya kenaikan omzet atau efisiensi), (3) kendala yang dihadapi, dan (4) kebutuhan dukungan lanjutan.
- Respon dianalisis secara cepat (max 1 minggu) untuk mengarahkan tindak lanjut seperti mentoring, grup diskusi, atau pemberian akses pasar.

- **Pemetaan inovasi produk/layanan.** Pemetaan inovasi bertujuan mengidentifikasi ide, produk, atau layanan baru yang muncul dari anggota atau kelompok pasca-pelatihan. Ini membantu program melihat potensi yang layak dikembangkan serta inovasi seperti apa yang bisa melibatkan serta memberi manfaat bagi anggota secara inklusif untuk perempuan dan laki-laki. Selain itu, pemetaan juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana inovasi tersebut berkontribusi dalam mengurangi stereotip dan diskriminasi gender dalam jenis usaha yang dijalankan.

Contoh praktis pemetaan inovasi/produk layanan

- Gunakan survei cepat (*pulse survey*) untuk menanyakan 2–3 pertanyaan singkat dalam laporan *monitoring* KPwDN: adanya inovasi baru (Ya/Tidak), status pengembangan (ide/prototipe/penjualan), dan dampak awal (% omzet/efisiensi).
- Pemetaan triwulanan untuk memetakan nama ide, nilai tambah, target pasar, % anggota terlibat, peran perempuan, dan kebutuhan dukungan.
- Penambahan kolom “Pemetaan Inovasi” untuk ringkasan ide dan tindak lanjut (*pilot, scale,* atau tunda) di laporan *monitoring* KPwDN.

Dimensi penguatan kelembagaan

- **Representasi perempuan dan laki-laki yang seimbang dalam kepengurusan dan pengambilan keputusan.** Kelompok perlu memiliki prosedur yang menjamin keterwakilan perempuan dan laki-laki yang seimbang dalam kepengurusan dan pengambilan keputusan di forum strategis. Jika diperlukan, program dapat menyepakati mekanisme kuota atau tindakan afirmasi jika kesenjangan terlalu besar, guna mengatasi bias struktural. Di tahap implementasi, penelitian merekomendasikan untuk mendorong pertemuan yang mempertimbangkan kondisi perempuan, seperti jadwal pertemuan yang ramah keluarga, pembagian tugas bergilir, atau mekanisme dukungan antar anggota dan keluarga. Untuk mengukur keberhasilan terhadap penguatan kelembagaan, kajian ini merekomendasikan penambahan pertanyaan pada tahap *monitoring* dan evaluasi.

Tabel 9.
Rekomendasi instrumen penguatan kelembagaan

Aspek	Pertanyaan terhadap anggota kelompok	Pertanyaan terhadap pengurus
Keaktifan anggota	Dalam 3 bulan terakhir, **seberapa sering Anda menghadiri pertemuan** atau **kegiatan rutin** bersama anggota **kelompok?** Apakah **Anda mengambil peran dalam kegiatan tersebut?** Jika ya, sebutkan.	● **Berapa tingkat kehadiran rata-rata anggota pada pertemuan** atau **kegiatan rutin** bersama kelompok? ● **Dukungan apa yang diberikan kelompok untuk** mendorong **pembagian tugas yang lebih seimbang** antar anggota kelompok?
Kepengurusan dan pengambilan keputusan	Dalam 3 bulan terakhir, **berapa kali Anda terlibat dalam pengambilan keputusan** di kelompok?	● Berapa **jumlah pengurus laki-laki dan perempuan dalam struktur kepengurusan** saat ini?
Pelibatan keluarga/ pasangan dalam ekosistem dukungan	**Apakah pasangan/keluarga mendukung Anda** bergabung dan **aktif di kelompok?** **Bentuk dukungan** apa saja **yang Anda terima?** Bagaimana **pandangan pasangan Anda terhadap keikutsertaan Anda dalam kelompok usaha?**	● **Bagaimana kelompok melibatkan pasangan/keluarga** dalam kegiatan?

***

Lampiran

Lampiran 1
Desain pendekatan campuran

Metode pengumpulan data	Tujuan	Sampling
Wawancara mendalam *(In-depth interviews)*	Menggali pengalaman perempuan dalam mengakses layanan keuangan, mengembangkan usaha, serta dinamika sosial-budaya dalam kelompok binaan.	Anggota kelompok binaan program EKI (berbagai profil: anggota aktif, pengurus kelompok binaan, anggota pasif). Pendamping/ Fasilitator kelompok binaan program EKI.
Diskusi kelompok terfokus *(Focus Group Discussion)*	Memvalidasi temuan awal dan menjaring masukan kebijakan dari para pemangku kepentingan lokal.	KPwDN, Dinas terkait, pendamping/ fasilitator kelompok baik dari LSM ataupun mitra pelaksana program kelompok binaan program EKI.
Analisis data sekunder	Menganalisis profil peserta, tingkat literasi, performa usaha, serta capaian program berdasarkan data BI dan hasil *monitoring* & evaluasi.	Data *monitoring* BI terkait program EKI: Data profil kelompok binaan.

Strategi pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk memilih lokasi dan responden berdasarkan variasi wilayah, model kelompok usaha (kolektif dan kemitraan), serta keterlibatan perempuan. Empat lokasi dipilih — Jakarta, Palu, Belitung, dan Bali — karena mewakili konteks geografis dan sosial-ekonomi yang beragam, serta aktif menjalankan usaha di sektor olahan pangan, kerajinan, pertanian, dan perikanan. Pendekatan ini membantu menggali beragam praktik dan tantangan yang dihadapi kelompok perempuan dalam program EKI.

Responden utama terdiri dari:

- Perempuan anggota kelompok usaha, termasuk pengurus dan pemimpin
- Pendamping/fasilitator lapangan
- Perwakilan BI (KPwDN), dan mitra pendukung program seperti dinas terkait (UMKM, koperasi, LSM)

Profil responden perempuan mencerminkan keragaman dalam literasi keuangan, pengalaman usaha, peran di kelompok dan rumah tangga, serta akses terhadap pelatihan. Sampel disusun untuk merepresentasikan variasi keterlibatan dan keberfungsian kelompok, agar analisis yang dihasilkan kontekstual dan relevan dengan tujuan program EKI.

Jenis responden	Jumlah	Rincian lokasi	Keterangan
Anggota dan pengurus kelompok subsisten binaan	**26** responden	Masing-masing 2 kelompok dari Jakarta, Belitung, dan Bali, dan 3 kelompok dari Palu	Termasuk ketua, bendahara, anggota aktif dan pasif
Fasilitator/ pendamping	**9** responden	Mewakili wilayah Palu, Belitung, Bali	Terlibat langsung dalam pelatihan dan pendampingan kelompok
Mitra pendukung program	**44** responden	Perwakilan dari total 19 institusi di 4 wilayah	Dinas, KPwDN BI, LSM, dinas teknis, dan *stakeholder* pelaksana lainnya
Total	**79** responden	Meliputi wawancara mendalam dan FGD multipihak	

Profil demografi responden

Dari total 35 responden (anggota, pengurus, dan fasilitator/pendamping) yang diwawancarai, mayoritas adalah perempuan, mencerminkan fokus program pada pemberdayaan perempuan dalam kelompok usaha binaan. Berikut adalah ringkasan karakteristik demografi:

1 **Jenis kelamin** Perempuan: **28 orang** | Laki-laki: **7 orang**

2 **Usia**

- Rentang usia responden berada di antara 18 hingga diatas 51 tahun.
- Kelompok usia produktif paruh baya (35-50 tahun) mendominasi, mencerminkan keterlibatan perempuan dewasa yang telah menyeimbangkan peran domestik dengan aktivitas usaha.
- Beberapa responden berusia di atas 55 tahun tetap aktif sebagai pengurus atau anggota kelompok.

3 **Latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi**

- Mayoritas responden merupakan lulusan SMA/sederajat, dengan sebagian kecil menyelesaikan Pendidikan SMP. Responden pendamping umumnya memiliki pendidikan lebih tinggi (minimal SMA atau diploma), dan berasal dari komunitas lokal maupun lembaga mitra.
- Sebagian besar perempuan adalah pelaku usaha rumahan atau mikro, dengan jenis usaha meliputi makanan olahan, kerajinan tangan, penjualan kebutuhan harian, atau kegiatan berbasis pertanian dan peternakan kecil.
- Di wilayah urban beberapa responden memiliki pengalaman sebelumnya sebagai buruh informal atau pekerja rumah tangga, dan bergabung dalam kelompok usaha sebagai bagian dari transisi menuju penguatan ekonomi keluarga.

4 **Status peran ganda dan keseharian**

Hampir seluruh responden perempuan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah tambahan. Waktu mereka terbagi antara urusan domestik, pengasuhan anak, dan aktivitas kelompok usaha.

Lampiran 2

Metode analisis untuk penyusunan rekomendasi

Pendekatan analisa

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan matriks rekomendasi ini menggabungkan teknik *Thematic Categorization* dan *Priority Mapping*.

- ***Thematic Categorization*** digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam kategori utama (*theme-based grouping*) berdasarkan ide solusi dan karakteristik permasalahan.

- ***Priority Mapping*** digunakan untuk memetakan ide solusi berdasarkan tingkat urgensi *(priority scale)* dan fase pelaksanaan *(implementation stage mapping)*.

Metode ini lazim digunakan dalam studi kebijakan, evaluasi program, dan fase pelaksanaan, serta mengacu pada pendekatan *Logical Framework Analysis (logframe)* yang dimodifikasi untuk menghubungkan temuan, kategori tematik, prioritas, dan tahapan pelaksanaan.

Tahapan analisa

Penyusunan matriks rekomendasi dilakukan melalui tiga langkah utama:

- Kategorisasi Tematik – Mengelompokkan ide solusi sesuai tema temuan (Norma Gender, Inisiasi, Pelatihan/Pendampingan, Keuangan), dan tingkat prioritas *(High* atau *Medium)*.

- Pemisahan Berdasarkan Tahapan – Menempatkan setiap ide solusi ke fase yang tepat: persiapan, implementasi, dan *monitoring* dan evaluasi.

- Pemetaan Prioritas – Mana saja ide solusi yang berdampak strategis & kritikal dengan mengadopsi masukan dari Bank Indonesia.

Daftar pustaka

Amri, K. (2023). Pendapatan perempuan dan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pencerahan*, 17(2), 49–76. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4255635

Asian Development Bank. (2021). *Gender equality and social inclusion assessment*. Manila: ADB. https://www.adb.org/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). *Rural women's empowerment in Southeast Asia*. Rome: FAO. http://www.fao.org

Germann, F., Anderson, S. J., Chintagunta, P. K., & Vilcassim, N. (2023). *Breaking the glass ceiling: Empowering female entrepreneurs through female mentors (BFI Working Paper)*. Becker Friedman Institute for Economics, University of Chicago. https://bfi.uchicago.edu/working-paper/breaking-the-glass-ceiling-empowering-female-entrepreneurs-through-female-mentors/

International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.)*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/Women_men_informal_economy_statistical_picture.pdf

International Fund for Agricultural Development. (2017). *Gender equality and women's empowerment: Policy*. Rome: IFAD. https://www.ifad.org/en/

J-PAL. (2025, January). *Gender and Economic Agency Initiative: Women's economic empowerment and family planning*. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/review-paper/GEA_Research-framing-paper-on-WEE-and-FP_2025.01.06.pdf

Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (2022). *Proses pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga pada masa pandemi COVID-19*. Jurnal Pembangunan Manusia, 3(1), 1–25. https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/25/

Universitas Gadjah Mada. (2022, December). *Studi dampak sosial permodalan usaha mikro PNM bagi peningkatan kapasitas perempuan: Laporan akhir untuk PT Permodalan Nasional Madani*. FISIPOL UGM. https://prisma.simaster.ugm.ac.id/karya_files/studi-dampak-sosial-permodalan-mikro-pnm-bagi-peningkatan-kapasitas-perempuan-di-delapan-provinsi-dcfcd07e645d245babe887e5e2daa016

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2022). *Gender-responsive entrepreneurship development in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNESCAP. https://www.unescap.org

UN Women. (2020). *Gender equality and women's empowerment in Asia-Pacific*. Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific. https://asiapacific.unwomen.org

Women's World Banking. (2021). *Revolutionizing product design in financial services: A gender-inclusive approach*. https://www.womensworldbanking.org/insights/report-revolutionizing-product-design-in-financial-services/

Women's World Banking. (2025). *Empowering Indonesian women domestic workers through digital financial capability*. https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2025/03/WWB_Empowering-Indonesian-Women-Domestic-Workers-through-Digital-Financial-Capability.pdf

World Bank. (2020). *Adapting skills training to address constraints to women's participation* (Jobs Note No. 7). World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/100001588563785232/pdf/Adapting-Skills-Training-to-Address-Constraints-to-Women-s-Participation.pdf

World Bank. (n.d.). *Training, skills, and information*. Digital for Women. https://digitalforwomen.worldbank.org/training-skills-information

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Women's World Banking

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350 Indonesia
Telepon : 131/ +6221 1500 131
E-mail : bicara@bi.go.id